

# LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN



## KATA PENGANTAR



Puji Syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan laporan kinerja unit kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan kinerja ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan selama Triwulan II Tahun 2024 atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA).

Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan sesuai sasaran strategis dan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Secara umum seluruh indikator yang dapat dinilai sampai dengan triwulan II telah mencapai target yang telah ditentukan.

Akhir kata, kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan memberikan gambaran tentang pelaksanaan kinerja Pusat Data Informasi Obat dan Makanan sampai dengan Triwulan II tahun 2024, serta dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, sekaligus menjadi sarana evaluasi, sehingga dapat menjadi perbaikan dan peningkatan kinerja demi mewujudkan *good governance* secara berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, 22 Juli 2024  
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



A. Indra Jaya Sukma., S.Kom., M.Kom

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sebagai bagian dari pemerintahan, Badan POM mempunyai tugas strategis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam membantu mewujudkan visi Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka diperlukan dukungan dalam hal teknologi informasi untuk mempermudah pengawasan obat dan makanan. Maka pada tahun 2024 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menyusun 9 (sembilan) sasaran strategis yaitu yaitu (1) Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal; (2) Meningkatnya Kepuasan *Stakeholder* terhadap Layanan TIK BPOM; (3) Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal; (4) Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan; (5) Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal; (6) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal; (7) Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi yang Berkinerja Optimal; (8) Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi yang Terintegrasi dan Adaptif; (9) Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi secara Akuntabel.

Sasaran strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan didukung oleh 20 (dua puluh) indikator kinerja utama dengan capaian sebagai berikut:

1. Indeks SPBE BPOM;
2. Indeks Kepuasan Layanan TIK;
3. Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti tepat waktu;
4. Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management*;
5. Indeks CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*);
6. Jumlah Data Berbagi Pakai;
7. Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir;
8. Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi dan *real time*;
9. Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan *Roadmap* TIK;
10. Indeks RB Pusat Data dan Informasi;

11. Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi;
12. Nilai Pengelolaan Kearsipan;
13. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi;
14. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal;
15. Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data, dan Keamanan;
16. Sertifikasi ISO 27001;
17. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi;
18. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa;
19. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
20. Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri.

Dalam melaksanakan program/kegiatan selama Triwulan II Tahun 2024, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.52.237.802.000,--. Sampai dengan 30 Juni 2024, Pusdatin telah mengalami 1 (satu) kali automatic adjustment sebesar Rp.2.246.209.000,-- yang dilakukan pada 31 Januari 2024 serta pemusatan anggaran Tunjangan Kinerja ke Sekretariat Utama sebesar Rp2.779.339.000,-- menjadi Rp49.458.463.000,--. Realisasi menurut aplikasi OM SPAN per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp24.743.212.550,-- atau 50,03%, sedangkan realisasi tanpa belanja pegawai sebesar Rp.7.579.198.038,-- atau 47,58%.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting digunakan sebagai masukan bagi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	6
A.    LATAR BELAKANG .....	6
B.    GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	7
C.    ISU STRATEGIS .....	8
D.    STRUKTUR ORGANISASI .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	9
A.    VISI .....	9
B.    MISI .....	9
C.    TUJUAN .....	9
D.    SASARAN STRATEGIS .....	10
E.    INDIKATOR .....	10
F.    RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	21
G.    PERJANJIAN KINERJA .....	22
H.    RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) .....	25
I.    REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) .....	27
J.    METODE PENGUKURAN .....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	30
A.    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	30
SASARAN KEGIATAN 1 .....	34
SASARAN KEGIATAN 2 .....	38
SASARAN KEGIATAN 3 .....	40
SASARAN KEGIATAN 4 .....	54
SASARAN KEGIATAN 5 .....	58
SASARAN KEGIATAN 6 .....	62
SASARAN KEGIATAN 7 .....	69
SASARAN KEGIATAN 8 .....	72
SASARAN KEGIATAN 9 .....	80
B.    REALISASI ANGGARAN .....	88
BAB IV PENUTUP .....	92

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Badan POM berupaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, serta mutu obat dan makanan yang tentu dalam perjalanannya menghadapi berbagai tantangan baik yang berasal dari dalam negeri maupun global. Untuk itu Badan POM telah menetapkan visi tahun 2020-2024 yaitu “Obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Pencapaian visi tersebut dapat terwujud apabila seluruh ASN di Badan POM menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal.

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan berperan penting dalam mewujudkan visi tersebut. Dalam pelaksanaannya, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memiliki peran strategis sebagai unit kerja pemberi layanan satu pintu terhadap data dan informasi di Badan POM. Saat ini Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan terus berupaya untuk melakukan pengintegrasian data dan informasi, agar masyarakat maupun *stakeholder* lebih mudah dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dituntut untuk melaksanakannya dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, terpercaya dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan tujuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Triwulan II Tahun 2024, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menyusun Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

## B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan adalah melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi meliputi tata kelola dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
2. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem informasi layanan internal meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi layanan internal dan informasi publik;
3. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem informasi layanan eksternal meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi layanan eksternal dan integrasi dan interkoneksi sistem informasi;
4. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola data dan informasi meliputi arsitektur dan layanan berbagi pakai data dan informasi;
5. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi tata kelola standar kebijakan, penjaminan mutu, monitoring, dan evaluasi standar teknologi informasi dan komunikasi; dan
6. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan teknologi informasi dan komunikasi meliputi penanganan insiden dan pemenuhan maturitas insiden keamanan siber.

Dilihat dari tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara garis besar, terdapat 3 (tiga) kegiatan prioritas Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan di tahun 2024, yakni:

1. Perkuatan keamanan aplikasi layanan publik Badan POM yang terintegrasi dengan OSS RBA;
2. Integrasi one apps untuk masyarakat;
3. Pengembangan *cloud computing* untuk backup dan development; dan
4. Penguatan keamanan *cyber* mengawal implementasi SPBE Nasional.

### C. ISU STRATEGIS

1. Integrasi OSS RBA – Perkuatan aplikasi layanan publik BPOM yang terintegrasi dengan OSS RBA;
2. *Infrastructure as a Service* – Pembangunan *cloud computing* untuk backup dan development;
3. Reviu *enterprise architecture* (EA) SPBE BPOM transformasi dari e-gov to i-gov;
4. Pemanfaatan *data analytics*;
5. Penguatan Keamanan *cyber* mengawal implementasi SPBE Nasional – Peningkatan maturitas pengelolaan CSIRT BPOM dan penguatan penyelenggaraan deteksi, monitoring, pengujian, proteksi serta penanganan insiden siber yang andal dan profesional; dan
6. Integrasi *one apps* untuk masyarakat – Integrasi seluruh aplikasi ke BPOM Mobile termasuk tindak lanjut integrasi halal.

### D. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi, Kepala Pusat Data dan Informasi dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 62 (enam puluh dua) orang dengan jabatan fungsional tertentu, 1 (satu) orang dengan jabatan fungsional umum, 5 (lima) orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan 14 (empat belas) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang tersebar dalam 6 (enam) fungsi sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. VISI

Dalam rangka mewujudkan visi misi pembangunan nasional, BPOM telah menetapkan visi yaitu:

**“Obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk  
mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan  
berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Visi BPOM merupakan komitmen Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam perannya sebagai unit pendukung BPOM dalam pengawasan obat dan makanan.

### B. MISI

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi BPOM 2020-2024, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menjabarkan misinya dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan kebutuhan para pemangku, sebagai berikut:

1. Mewujudkan TIK terintegrasi untuk mendukung pengawasan obat dan makanan;
2. Menstandarisasi teknologi informasi dan komunikasi di BPOM;
3. Meningkatkan keamanan data dan informasi obat dan makanan; dan
4. Melaksanakan manajemen kelembagaan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang profesional.

### C. TUJUAN

Sesuai dengan tugas Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan untuk melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka tujuan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan adalah:

1. Terwujudnya pemenuhan standar data, sistem informasi, infrastruktur dan keamanan TIK BPOM;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas layanan teknologi informasi di lingkungan BPOM;

3. Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal; dan
4. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM.

#### D. SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditentukan, maka Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan merumuskan 9 (sembilan) sasaran strategis yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis pada level *Stakeholder Perspective*, 3 (tiga) sasaran strategis pada level *Internal Process Perspective* dan 4 (empat) sasaran strategis pada level *Learn and Growth Perspective* sebagai berikut:

NO	LEVEL	SASARAN STRATEGIS
1	<i>Stakeholder Perspective</i>	Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal
2		Meningkatnya Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan TIK BPOM
3	<i>Internal Process Perspective</i>	Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal
4		Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
5		Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal
6	<i>Learn and Growth Perspective</i>	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal
7		Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal
8		Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang terintegrasi dan adaptif
9		Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Pusdatin

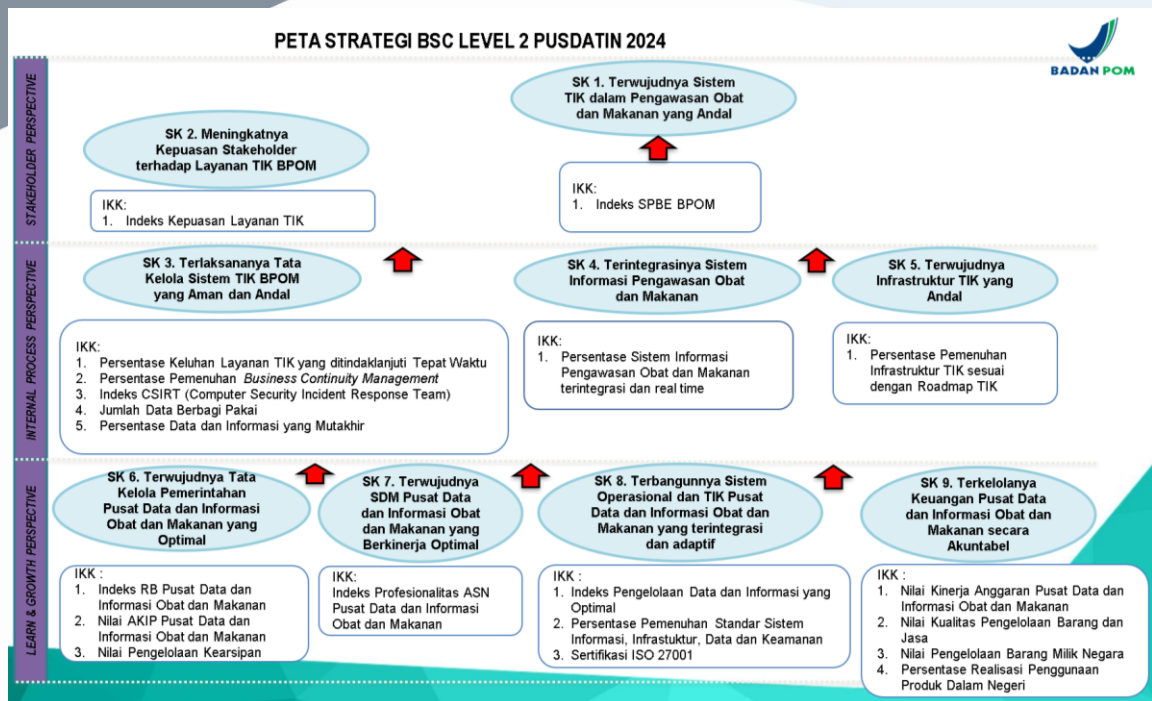
#### E. INDIKATOR

Guna mewujudkan 9 (sembilan) sasaran strategis tersebut, dan dengan adanya beberapa perubahan tugas serta adanya penambahan indikator kinerja, maka Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan merumuskan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<i>Stakeholder Perspective</i>		
1	Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	1. Indeks SPBE BPOM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
2	Meningkatnya Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan TIK BPOM	1. Indeks Kepuasan Layanan TIK
<i>Internal Process Perspective</i>		
3	Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal	1. Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti tepat waktu
		2. Persentase Pemenuhan <i>Business Continuity Management</i>
		3. Indeks CSIRT ( <i>Computer Security Incident Response Team</i> )
		4. Jumlah Data Berbagi Pakai
		5. Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir
4	Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan <i>Realtime</i>
5	Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal	1. Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK
<i>Learn and Growth Perspective</i>		
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	1. Indeks RB
		2. Nilai AKIP
		3. Nilai Pengelolaan Kearsipan
7	Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
8	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang terintegrasi dan adaptif	1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal
		2. Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan
		3. Sertifikasi ISO 27001
9	Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
		2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
		3. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
		4. Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Pusdatin



Gambar 2. 1 Peta Strategis Pusdatin

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024
Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	Indeks SPBE Badan POM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;</li> <li>Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi SPBE adalah berdasarkan Peraturan Menteri PANRB terbaru nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</li> <li>Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari perhitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain.</li> <li>Penilaian SPBE meliputi 4 domain antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Domain Kebijakan (Bobot 13%) Merupakan kebijakan internal/pengaturan-pengaturan di dalam kebijakan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Penilaian dilakukan terhadap kriteria kekuatan hukum dan ruang lingkup kebijakan internal yang dimaksud. Pada domain ini terdapat 1 aspek penilaian yaitu <b>Aspek Kebijakan Tata Kelola SPBE</b>.</li> <li>Domain Tata Kelola (Bobot 25%) Merupakan proses/ implementasi dari kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah (perencanaan-penerapan analisis/evaluasi-tindak lanjut). Penilaian dilakukan terhadap kriteria proses/ implementasi/cakupan yang telah</li> </ol> </li> </ul>	4,10

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024
		<p>dilakukan/dipenuhi oleh Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah terkait substansi indikator dimaksud yang telah terdokumentasi secara formal. Pada domain ini terdapat 3 aspek penilaian yaitu <b>Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Aspek Penyelenggara SPBE.</b></p> <p>3. Domain Manajemen (Bobot 16,5%) Merupakan proses/implementasi dari penerapan manajemen yang telah dilaksanakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (perencanaan-penerapan/pelaksanaan-analisis/evaluasi-tindak lanjut). Penilaian dilakukan terhadap kriteria proses/implementasi/cakupan yang telah dilakukan/dipenuhi oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah terkait substansi indikator dimaksud yang telah terdokumentasi secara formal. Pada domain ini terdapat 2 aspek penilaian yaitu <b>Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Audit TIK.</b></p> <p>4. Domain Layanan (Bobot 45,5%) Merupakan penerapan penggunaan terhadap layanan aplikasi baik yang dikembangkan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau menggunakan Aplikasi Umum / Instansi lain. Penilaian dilakukan dengan mengukur Kapabilitas Fungsi Teknis kemampuan fitur teknis yang dimiliki layanan aplikasi tersebut. Pada domain ini terdapat 2 aspek penilaian yaitu <b>Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan Aspek Layanan Publik.</b></p>	
Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM	Indeks Kepuasan Layanan TIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepuasan layanan TIK adalah kepuasan terhadap layanan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data meliputi kemudahan pencarian, analisa, dan visualisasi data;</li> <li>2. Sistem Informasi meliputi fitur (kemudahan pencarian) penggunaan aplikasi;</li> <li>3. Infrastruktur meliputi fasilitas zoom, wifi dan jaringan;</li> <li>4. Keamanan meliputi antivirus dan update OS.</li> </ol> </li> <li>• Kepuasan layanan TIK diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pengguna Layanan TIK di BPOM dalam memperoleh pelayanan dari Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.</li> <li>• Pengguna Layanan TIK dalam pengisian survey ini adalah seluruh pegawai di BPOM.</li> </ul>	3,50
Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM	Persentase Keluhan Layanan TIK yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan keluhan layanan TIK adalah penanganan terhadap permasalahan sistem informasi, infrastuktur dan atau database yang dialami pengguna, yang dapat mengganggu</li> </ul>	98,5%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024
yang Aman dan Andal	ditindaklanjuti tepat waktu	<p>keberlangsungan operasional kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respon time adalah waktu yang dibutuhkan untuk merespon penanganan layanan keluhan TIK.</li> <li>• Respon time: 1 Hari Kerja</li> <li>• Penanganan Keluhan: maks 15 Hari Kerja bila memerlukan spare part atau berkoordinasi dengan pihak eksternal</li> <li>• Layanan TIK terdiri dari:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem informasi, layanan keluhan terhadap aplikasi SIPT;</li> <li>2. Infrastruktur, layanan keluhan terhadap internet dan pemeliharaan infrastruktur; dan</li> <li>3. Data, layanan terhadap integrasi data pada aplikasi e-bpom</li> </ol> </li> </ul>	
	Persentase Pemenuhan <i>Business Continuity Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Business Continuity Management</i> (BCM) adalah suatu rangkaian proses sistem manajemen yang terencana, terukur, dan menyeluruh; yang mencakup identifikasi dini, pengembangan ketahanan, kemampuan pengendalian setiap potensi insiden secara efektif, pemulihan kondisi, dan proses penyelenggaraan kegiatan kembali ke normal; untuk menjamin keberlangsungan bisnis organisasi Badan POM.</li> <li>• Output BCM:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Business Continuity Plan</i> (BCP): Dokumen dan prosedur yang menjelaskan bagaimana mengaktifkan solusi kesinambungan bisnis, bagaimana mengelola situasi krisis dan bagaimana kembali ke operasi standar;</li> <li>2. <i>Crisis Management Organisational Model</i>: Model yang menggambarkan peran, kriteria dan aturan, mengkoordinasikan dan mengelola keadaan darurat; Jika terjadi krisis, eskalasi informasi dan keputusan ke semua tingkat Organisasi memastikan kontrol terkoordinasi, baik manajerial maupun operasional, dari krisis;</li> <li>3. <i>Disaster Recovery Plan</i> (DRP): Menggambarkan semua prosedur teknis dan organisasi yang diperlukan untuk mengatasi gangguan layanan TI, aplikasi, komunikasi atau kehilangan data, melalui pemulihan sistem di lokasi alternatif.</li> </ol> </li> <li>• Untuk melihat efektivitas BCM dilakukan simulasi <i>disaster recovery plan</i> (DRP).</li> </ul>	75%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024
	Indeks CSIRT ( <i>Computer Security Incident Response Team</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks CSIRT adalah pengukuran tingkat maturitas penanganan insiden keamanan siber.</li> <li>Penilaian indeks CSIRT menggunakan tools yang disusun oleh BSSN, penilaian ini untuk memproses tingkat kesiapan Penanganan Insiden Keamanan Siber dari Instansi sesuai isian responden. Tiap pilihan jawaban dari masing-masing pertanyaan memiliki poin (nilai) yang akan menentukan Tingkat Kesiapan yang akan dikonversi ke dalam indeks 1-5.</li> <li>Pengukuran CSIRT melalui 3 Fase yaitu: Fase 1 : Persiapan; Fase 2: Respon; Fase 3: Tindakan lanjut.</li> </ul>	4,6
	Jumlah Data Berbagi Pakai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data berbagipakai adalah layanan informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan pengawasan obat dan makanan yang dapat dibagipakaikan melalui portal satu data BPOM.</li> <li>Pusat Data dan Informasi hanya sebagai pengguna, pembuat konsep validasi, dan mengatur transaksi data. Sedangkan kepemilikan data tetap berada di unit lain</li> </ul>	30
	Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data dan Informasi yang mutakhir adalah data dan informasi yang disajikan dalam bentuk dashboard (analitik) Operational Center, dan atau yang dapat diakses setiap saat, sesuai dengan sumber data dan dipelihara/dikembangkan sesuai dengan kebutuhan unit teknis.</li> <li>Data mutakhir yang dimaksud adalah data terkini.</li> <li>Analitik yang dimaksud adalah deskripsi data, analitik, dan forecasting. Tidak termasuk memberikan usulan kebijakan.</li> </ul>	100%
Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi dan <i>realtime</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem Informasi adalah media dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Sistem informasi mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan.</li> <li>Sistem informasi mencakup aplikasi, infrastruktur dan data.</li> <li>Terintegrasi adalah kondisi dimana seluruh sistem informasi pengawasan obat dan makanan saling terhubung dan menghasilkan informasi yang komprehensif. Aktivitas integrasi sistem informasi dilakukan melalui seluruh atau sebagian dari 10 komponen pengintegrasian, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>Terintegrasi dengan OSS;</li> <li>Terintegrasi dengan Web Reg;</li> <li>Single Sign On;</li> </ol> </li> </ul>	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024
		<p>4. Tampilan Data Terintegrasi (BOC);            5. E-payment;            6. KSWP;            7. Data Lake;            8. Gateway COVID;            9. TTE; dan            10. Integrasi lainnya yang melibatkan lebih dari 1 aplikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Realtime</i> adalah waktu aktual dimana satu proses atau peristiwa tercatat pada sistem.</li> </ul>	
Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruktur TIK adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/ penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.</li> <li>• Penyediaan infrastruktur TIK untuk mendukung proses bisnis pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>• Roadmap TIK yang digunakan adalah roadmap TIK Tahun 2020-2024.</li> <li>• Roadmap TIK Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan kebutuhan infrastruktur pada tahun berjalan.</li> </ul>	100%
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal	Indeks RB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.</li> <li>• Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.</li> <li>• Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui RB, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.</li> <li>• Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.</li> <li>• Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada Pusat Data dan</li> </ul>	86,1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024
		Informasi Obat dan Makanan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.	
	Nilai AKIP	Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpes No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian <i>outcomes</i> dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai AKIP merupakan nilai hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Utama atas dokumen AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.	84
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan: 1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan); 2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan; 3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis); 4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen; dan 5. Sumber Daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.	94,50
Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN	Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari 4 (empat) dimensi sebagai berikut: 1. Dimensi Kualifikasi (bobot penilaian 25%) Mengukur data/informasi mengenai kualifikasi Pendidikan formal PNS yang terakhir. 2. Dimensi Kompetensi (bobot penilaian 40%) Mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan tugas jabatan. 3. Dimensi Kinerja (bobot penilaian 30%) Mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja. Data penilaian kinerja yang diukur adalah penilaian kinerja PNS 1 (satu) tahun terakhir. 4. Dimensi Disiplin (bobot penilaian 5%) Mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang pernah diterima PNS dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.	89,63

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024
Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	<p>Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan dalam sistem BOC               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.</li> <li>2. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.</li> <li>3. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan</li> <li>4. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu <i>update</i> pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.</li> <li>5. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data.</li> <li>6. Data yang tersedia di BOC di <i>update</i> setiap bulan oleh Pusat Data dan Informasi</li> <li>7. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah waktu verifikasi data oleh pemilik data dengan jumlah bulan dalam setahun</li> </ol> </li> <li>• Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi Badan POM               <p>Sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup email dan <i>dashboard</i> BOC.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja/bidang/bagian/subdit maupun individu.</li> <li>b) Akun email yang aktif adalah dilihat dari traffic pengiriman dan penerimaan email.</li> <li>c) Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah akun email pegawai dan unit yang aktif dibagi dengan jumlah total akun email pegawai dan Unit/Balai POM.</li> </ol> </li> <li>2. <i>Dashboard</i> BCC                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Komponen ini untuk menghitung keaktifan akun pimpinan untuk login dan mengakses dashboard BOC</li> <li>b) Jumlah akun login dihitung dalam 1 (satu) bulan (minimal 2 kali dalam seminggu)</li> <li>c) Jumlah akun login dan mengakses dashboard dilihat dari aktifitas akses dashboard</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul>	3,00
	Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar Sistem Informasi adalah serangkaian acuan (standar) dalam proses pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi untuk menjamin pengembangan sesuai bisnis dan keamanan, baik dari pengelolaan data dan sistem informasi.</li> </ul>	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024
	Data dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu</li> <li>Standar Infrastruktur adalah standar yang mendasari pembangunan infrastruktur dalam organisasi dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien dan fleksibel.</li> <li>Standar Keamanan Informasi adalah serangkaian acuan (standar) dalam melindungi aset informasi dari berbagai bentuk ancaman untuk memastikan kelangsungan kegiatan, menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi.</li> </ul>	
	Sertifikasi ISO 27001	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikasi ISO 27001:2013 yang berhasil dipertahankan Pusat Data dan Informasi pada tahun berjalan</li> <li>Sertifikasi ISO 27001:2013 merupakan suatu standar Internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi</li> </ul>	1
Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai kinerja anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Unit Kerja yang diperoleh dari nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)</li> <li>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.</li> <li>13 Indikator pembentuk indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Revisi DIPA</li> <li>Deviasi Halaman III DIPA</li> <li>Pengelolaan UP dan TUP</li> <li>Rekon LPJ Bendahara</li> <li>Data Kontrak</li> <li>Penyelesaian Tagihan</li> <li>Penyerapan Anggaran</li> <li>Retur SP2D</li> <li>Perencanaan Kas (Renkas)</li> <li>Pengembalian/Kesalahan SPM</li> <li>Dispensasi Penyampaian SPM</li> <li>Pagu Minus</li> <li>Konfirmasi Capaian output</li> </ol> </li> </ul>	90,25
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	<p>Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pengadaan barang/jasa yang diselesaikan dibandingkan dengan perencanaan berdasarkan RUP yang terumumkan 100% (Bobot 40%);</li> <li>Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa (Bobot: 60%): <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan</li> </ul> </li> </ol>	81

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024
		<p>untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 20%);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase penerapan proses ETendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%);</li> <li>• Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%);</li> <li>• Persentase penerapan proses non ETendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 20%);</li> <li>• Persentase E-Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%).</li> </ul>	
	<p>Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara</p>	<p>Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan. Kualitas pelaporan (Bobot 75%) dan Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%). Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut - Tanggal penerimaan &gt; H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0) - H-0 &lt; Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25) - H-3 &lt; tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75) - Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu ( Skor 100)</li> <li>• Ketepatan waktu penyampaian RKBMN. Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut - Tanggal penerimaan &gt; H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0) - H-0 &lt; Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25) - H-3 &lt; tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75) - Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu ( Skor 100)</li> <li>• Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan</li> </ul>	<p>87</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024
		<p>tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: (Total Nilai Aset yang telah diPSP (SIMAN) / Total Aset) x 100%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: nilai total penghapusan yang diusulkan disetujui / total barang rusak berat x 100 %.</li> <li>• Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: Nilai total pemusnahan yang diusulkan / total barang usang atau rusak x 100 %.</li> </ul>	
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	<p>Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.</li> <li>2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.</li> </ol>	69,22%

Tabel 2.3 Definisi Operasional Pusdatin

## F. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2024 bagi Kepala Pusat Data dan Informasi kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 disusun sebelum penyusunan anggaran pada tanggal 14 Juli 2023.

Sasaran strategis dan indikator kinerja Pusat Data dan Informasi ditunjukkan sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal**, dengan indikator sasaran Indeks SPBE Badan POM sebesar 3,50.
2. **Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM**, dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Layanan TIK sebesar 3,50.

3. **Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal**, dengan indikator sasaran:
  - a. Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu sebesar 97%;
  - b. Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management* sebesar 75%;
  - c. Indeks CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) sebesar 4,6;
  - d. Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan sebesar 100%;
  - e. Jumlah Data Berbagi Pakai sebesar 30; dan
  - f. Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir sebesar 100%.
4. **Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan**, dengan indikator sasaran Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi dan *Realtime* sebesar 100%.
5. **Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal**, dengan indikator sasaran Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan *Roadmap* TIK sebesar 100%.
6. **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal**, dengan indikator sasaran:
  - a. Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebesar 82,2;
  - b. Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 89,4.
7. **Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal**, dengan indikator sasaran Indeks Profesionalisme ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebesar 80.
8. **Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif**, dengan indikator sasaran:
  - a. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal sebesar 3;
  - b. Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan sebesar 100%;
  - c. Sertifikasi ISO 27001 sebesar 1 sertifikat.
9. **Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel**, dengan indikator sasaran Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebesar 96%.

#### **G. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dituangkan dalam pernyataan perjanjian kinerja tanggal 22 Desember 2023. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan unit untuk memantau kinerja secara berkala dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	Indeks SPBE Badan POM	4,1
2	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM	Indeks Kepuasan Layanan TIK	3,5
3	Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	98,5%
		Persentase Pemenuhan <i>Business Continuity Management</i>	75%
		Indeks CSIRT ( <i>Computer Security Incident Response Team</i> )	4,6
		Jumlah Data Berbagi Pakai	30
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100%
4	Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan <i>Realtime</i>	100%
5	Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan <i>Roadmap</i> TIK	100%
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal	Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86,1
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	84
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94,5
7	Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	89,63
8	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	3
		Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	100%
		Sertifikasi ISO 27001	1
9	Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	90,25%
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	81

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Makanan secara Akuntabel	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	87
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	69,22

*Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Pusdatin*

## H. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana aksi dapat dilihat pada tabel 2.5.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Indeks SPBE Badan POM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,10	1,053,634,000
2.	Indeks Kepuasan Layanan TIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50	666,971,000
3.	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	94%	94%	95%	95%	95%	96%	96%	97%	97%	98%	98%	98,5%	1,751,835,000
4.	Persentase Pemenuhan <i>Business Continuity Management</i>	45,5%	45,5%	50%	50%	55%	55%	60%	60%	65%	70%	70%	75%	418,060,000
5.	Indeks CSIRT ( <i>Computer Security Incident Response Team</i> )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	1,754,535,000
6.	Jumlah Data Berbagi Pakai	2	4	6	8	10	15	17	20	22	25	27	30	1,330,986,000
7.	Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	8%	16%	28%	36%	44%	52%	60%	68%	80%	88%	96%	100%	600,095,000
8.	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan <i>Realtime</i>	85%	85%	86%	86%	87%	87%	89%	91%	93%	95%	97%	100%	14,044,086,000
9.	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan <i>Roadmap</i> TIK	-	-	10%	35%	35%	50%	50%	50%	65%	65%	80%	100%	1,072,936,000
10.	Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,1	649,024,000
11.	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	715,726,000
12.	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,5	62,000,000
13.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,63	1,139,310,000
14.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,154,011,000

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
15.	Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	100%	421,000,000
16.	Sertifikasi ISO 27001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	374,390,000
17.	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	52%	52%	60%	62%	64%	66%	68%	70%	72%	74%	80%	90,25%	14,970,338,000
18.	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	77	81	1,200,000,000
19.	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	221,222,000
20.	Persentase Realisasi Penggunaan Poduk dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,22	7,637,643,000

Tabel 2.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pusdatin

Penjelasan terhadap tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Kolom (2) berisi indikator kinerja;
2. Kolom (3) berisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada bulan Januari;
3. Kolom (4) berisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada bulan Februari;
4. Kolom (5) berisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada bulan Maret;
5. Kolom (6) berisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada bulan April;
6. Kolom (7) berisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada bulan Mei;
7. Kolom (8) berisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada bulan Juni;
8. Kolom (9) berisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada bulan Juli;
9. Kolom (10) berisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada bulan Agustus;
10. Kolom (11) berisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada bulan September;
11. Kolom (12) berisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada bulan Oktober;
12. Kolom (13) berisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada bulan November;
13. Kolom (14) berisi dengan target kinerja yang akan dicapai pada bulan Desember;
14. Kolom (15) berisi anggaran per indikator kinerja.

## I. REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Sehubungan dengan adanya Surat dari Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor B-PR.07.2.21.05.24.382 tanggal 14 Mei 2024 perihal Revisi Target Nilai Kinerja Anggaran pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2024 dan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga (Lampiran II), terdapat perubahan bobot indikator, komponen pembentuk indikator, maupun waktu pengukuran dan penilaian IKPA. Mengacu juknis tersebut, penilaian indikator revisi DIPA dan indikator kinerja belanja kontraktual menggunakan basis data per semester, dan indikator kinerja dispensasi SPM pada triwulan IV menjadi pengurang nilai akhir IKPA setahun. Dengan demikian nilai akhir IKPA adalah yang tersaji di OMSPAN pada akhir tahun anggaran. Dengan adanya perubahan tersebut, maka pengukuran kedua komponen pembentuk NKA yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) akan diperoleh pada akhir tahun pelaksanaan anggaran (B12). Rencana aksi dapat dilihat pada tabel 2.6.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Indeks SPBE Badan POM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,10	1,053,634,000
2.	Indeks Kepuasan Layanan TIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50	666,971,000
3.	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	94%	94%	95%	95%	95%	96%	96%	97%	97%	98%	98%	98,5%	1,751,835,000
4.	Persentase Pemenuhan <i>Business Continuity Management</i>	45,5%	45,5%	50%	50%	55%	55%	60%	60%	65%	70%	70%	75%	418,060,000
5.	Indeks CSIRT ( <i>Computer Security Incident Response Team</i> )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	1,754,535,000
6.	Jumlah Data Berbagi Pakai	2	4	6	8	10	15	17	20	22	25	27	30	1,330,986,000
7.	Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	8%	16%	28%	36%	44%	52%	60%	68%	80%	88%	96%	100%	600,095,000
8.	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan <i>Realtime</i>	85%	85%	86%	86%	87%	87%	89%	91%	93%	95%	97%	100%	14,044,086,000
9.	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan <i>Roadmap</i> TIK	-	-	10%	35%	35%	50%	50%	50%	65%	65%	80%	100%	1,072,936,000

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
10.	Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,1	649,024,000
11.	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	715,726,000
12.	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,5	62,000,000
13.	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,63	1,139,310,000
14.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,154,011,000
15.	Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	100%	421,000,000
16.	Sertifikasi ISO 27001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	374,390,000
17.	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,25%	14,970,338,000
18.	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	77	81	1,200,000,000
19.	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	221,222,000
20.	Persentase Realisasi Penggunaan Poduk dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,22	7,637,643,000

Tabel 2.6 Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pusdatin

## J. METODE PENGUKURAN

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus dibawah ini:

$$\% \text{ Capaian} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

KRITERIA	CAPAIAN	KET	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Tidak dapat disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Sangat Baik	100% < X ≤ 120%	Biru	Efektif
Baik	=100%	Hijau	Efektif
Cukup	70% ≤ X < 100%	Kuning	Kurang Efektif
Kurang	<70%	Merah	Tidak Efektif

Tabel 2.7 Kriteria Capaian IKU

Setelah data diinput oleh penanggung jawab data, pimpinan satuan kerja melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:

1. Valid, yakni diukur menggunakan alat ukur tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
2. Reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
3. Obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan

Selanjutnya apabila data yang diinput sudah valid, reliable dan obyektif, dilanjutkan dengan melakukan penilaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja satuan kerja yang memiliki peta strategi. Berikut ini ada rumus perhitungan NPSS:

$$\text{NPSS} = \frac{\sum \text{Nilai Perspektif (NP)}}{\sum \text{Perspektif (P)}}$$

Ketentuan dalam menghitung NPSS dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja, nilai perspektif ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator;
2. Sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator kinerja, nilai perspektif ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh indikator;
3. Indikator dengan capaian >120%, penghitungan nilai perspektif menggunakan nilai maks 120%. Pusdatin memiliki 1 (satu) NPS yang nilainya melebihi 120% yaitu Sasaran Strategis Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal dengan indikator Indeks SPBE. Hal ini disebabkan penilaian Indeks SPBE

dilakukan oleh Kementerian PANRB dimana tren capaiannya sangat fluktuatif setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2023 realisasi melambung jauh dari target yang telah ditetapkan; dan

- Total NPSS ditentukan dengan menghitung rata-rata nilai perspektif seperti contoh dibawah ini

Perspektif/SS	Nilai Perspektif/NSS
<b>Stakeholder</b>	<b>90</b>
SS1	90
<b>Internal Process</b>	<b>(100+90+85+90)/4 = 91,25</b>
SS 2	100
SS 3	90
SS 4	85
SS 5	90
<b>Learning and Growth</b>	<b>(75+80+60)/3 = 71,67</b>
SS 6	75
SS 7	80
SS 8	60
<b>NPSS</b>	<b>(90+91,25+71,67)/3 = 84,30</b>

Gambar 2.2 Contoh Total NPSS

Kinerja yang telah dicapai Pusdatin diberikan predikat kinerja sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

PREDIKAT	NPSS	NOTIFIKASI WARNA
Istimewa	> 100	Biru
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	Hijau
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	Orange
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	Kuning
Sangat Kurang	<50	Merah

Tabel 2.8 Predikat NPSS

NPSS yang digunakan untuk evaluasi kinerja pegawai terdiri atas:

- NPSS periodik yang digunakan untuk menetapkan predikat kinerja periodik pegawai; dan
- NPSS tahunan yang digunakan untuk menetapkan predikat kinerja tahunan pegawai.

Predikat kinerja organisasi tersebut akan menentukan pola distribusi kinerja yang digunakan sebagai pertimbangan bagi pimpinan satuan kerja dalam menentukan predikat kinerja pegawai di bawahnya.

Pengukuran efisiensi dari kinerja diperoleh dengan membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila  $IE \geq SE$  maka kegiatan dianggap efisien, apabila  $IE \leq SE$  maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
< 0	Tidak Efisien
0 – 0,2	100% (efisien)
0,21 – 0,4	95% (efisien)
0,41 – 0,6	92% (efisien)
0,61 – 0,8	90% (efisien)
0,81 – 1,0	88% (efisien)
1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
> 1,81	75% (tidak efisien)

Tabel 2.9 Tingkat Efisiensi

Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala setiap bulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) bulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Pusdatin adalah sebagai berikut:

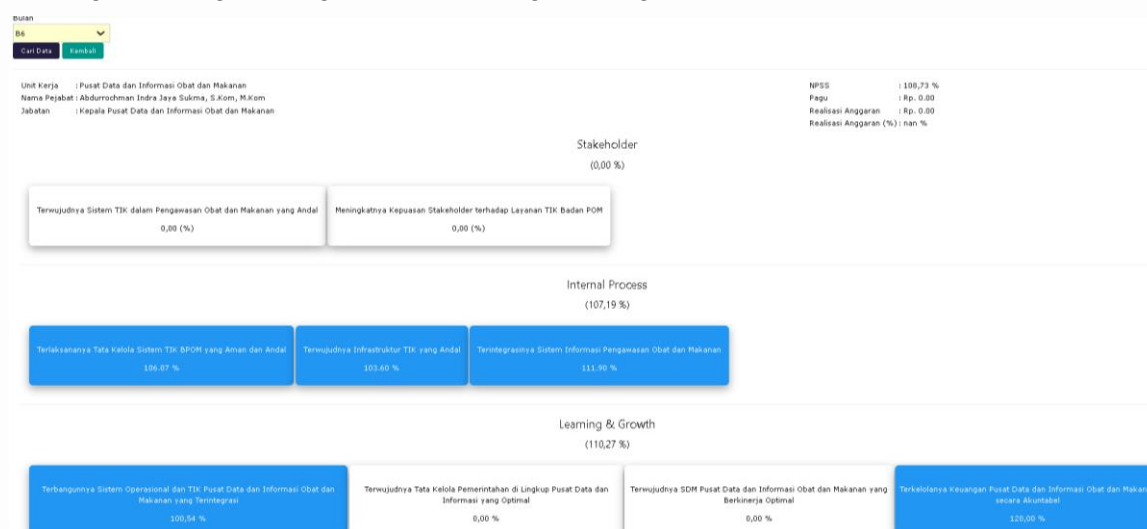
1. Adanya SOP Pengumpulan Data Kinerja Pusdatin yang telah disahkan oleh Kepala Pusdatin pada tanggal 05 Juni 2020 dan dilakukan revisi ketiga pada tanggal 20 Januari 2023;
2. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di Pusdatin yang disahkan oleh SK Kepala BPOM;
3. Kepala Pusdatin menunjuk perwakilan penanggungjawab data disetiap fungsi dengan menerbitkan SK Kepala Pusdatin;
4. Penanggungjawab data di setiap fungsi menginput data kinerja pada data base online secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Pusdatin; dan
5. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SAKTI, SMART DJA, matirks RKP ([bit.ly/capaianpusattahun2024](https://bit.ly/capaianpusattahun2024)) dan e-performance serta monev Bappenas, dan monev RHPK yang diinput pada setiap bulannya.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis di Pusdatin untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2024 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan II tahun 2024, membandingkan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2024, melakukan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dan dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan II tahun 2024, diperoleh nilai NPSS sementara sebesar 108,37% dengan kriteria **ISTIMEWA**, terdiri dari NPS perspektif stakeholder sebesar 0%, NPS perspektif internal proses sebesar 107,19%, NPS perspektif learning & growth sebesar 110,27%. NPS perspektif stakeholder belum terdapat capaiannya dikarenakan indikator kinerja dalam perspektif tersebut di nilai pada akhir tahun 2024. Dengan demikian disimpulkan bahwa sebagian besar target sasaran strategis dari semua perspektif telah dapat dicapai. Hasil tersebut merupakan evaluasi dari 5 (lima) sasaran strategis dari 9 (sembilan) sasaran strategis yang harus dievaluasi. 4 (empat) sasaran strategis lainnya belum bisa dievaluasi menunggu penilaian indikator kinerja di akhir tahun. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:



Gambar 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan II

### Analisis Akuntabilitas Kinerja

Tahun 2024 Pudatin memiliki 9 (Sembilan) sasaran strategis dan 20 (Dua puluh) indikator kinerja, masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja akan diukur capaian kinerjanya. Berikut data capaian di setiap indikator kinerja dan sasaran strategis pada triwulan II (Januari-Juni):

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi Tahunan	Realisasi TW II	Capaian TW II (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria terhadap Capaian Tahunan
<i>Stakeholder Perspective</i>								
Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	Indeks SPBE Badan POM	4,10	-	Akhir Tahun	-	-	Akhir Tahun	Belum dapat ditentukan
Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM	Indeks Kepuasan Layanan TIK	3,50	-	Akhir Tahun	-	-	Akhir Tahun	Belum dapat ditentukan
<i>Internal Process Perspective</i>								
Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	98,5%	96%	98,59%	98,59%	102,70%	100,09%	Sangat Baik
	Persentase Pemenuhan <i>Bussines Continuity Management</i>	75%	55%	63,1%	63,1%	114,73%	84,13%	Cukup
	Indeks CSIRT ( <i>Computer Security Incident Response Team</i> )	4,6	-	Akhir Tahun	-	-	Akhir Tahun	Belum dapat ditentukan
	Jumlah Data Berbagi Pakai	30	15	15	15	100%	50%	Kurang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi Tahunan	Realisasi TW II	Capaian TW II (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria terhadap Capaian Tahunan
	Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100%	52%	55,56%	55,56%	106,85%	55,56%	Kurang
Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan <i>Realtime</i>	100%	87%	97,35%	97,35%	111,90%	97,35%	Cukup
Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan <i>Roadmap</i> TIK	100%	50%	51,80%	51,80%	103,60%	51,80%	Kurang
<b>Learn and Growth Perspective</b>								
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal	Indeks RB Pusat Data dan Informasi	86,1	-	Akhir Tahun	-	-	Akhir Tahun	Belum dapat ditentukan
	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	84	-	Akhir Tahun	-	-	Akhir Tahun	Belum dapat ditentukan
	Nilai Pengelolaan Arsip	94,5	-	Akhir Tahun	-	-	Akhir Tahun	Belum dapat ditentukan
Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi	89,63	-	Akhir Tahun	-	-	Akhir Tahun	Belum dapat ditentukan
Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi yang terintegrasi dan adaptif	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	3	3	3	3	100%	100%	Baik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi Tahunan	Realisasi TW II	Capaian TW II (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria terhadap Capaian Tahunan
	Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Data, Keamanan dan Infrastruktur	100%	85%	85,92%	85,92%	101,08%	85,92%	Cukup
	Sertifikasi ISO 27001	1	-	Akhir Tahun	-	-	Akhir Tahun	Belum dapat ditentukan
Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	90,25	-	Akhir Tahun	-	-	Akhir Tahun	Belum dapat ditentukan
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	81	55	80	80	145,45%	98,76%	Cukup
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	87	-	Akhir Tahun	-	-	Akhir Tahun	Belum dapat ditentukan
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	69,22%	-	Akhir Tahun	-	-	Akhir Tahun	Belum dapat ditentukan

Tabel 3.1 Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama Triwulan II

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang realisasi kerjanya tercapai dengan kriteria **SANGAT BAIK**, 1 (satu) indikator kinerja yang realisasi kerjanya tercapai dengan kriteria **BAIK**, 4 (empat) indikator kinerja yang realisasi kerjanya tercapai dengan kriteria **CUKUP**, 3 (tiga) indikator kinerja yang realisasi kerjanya tercapai dengan kriteria **KURANG** dan 11 (sebelas) indikator kinerja yang realisasi kerjanya tercapai dengan kriteria **BELUM DAPAT DITENTUKAN**. Kriteria baik menunjukkan bahwa target triwulan II tahun 2024 sudah dapat tercapai. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pusdatin, dengan rinciannya adalah sebagai berikut:

## **SASARAN KEGIATAN 1** **Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal**

### **Indeks SPBE**

- 1. Perbandingan target dan realisasi triwulan II Tahun 2024**  
Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kerjanya dilakukan di akhir tahun dan dilakukan oleh KemenPAN RB.
- 2. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2024 dengan triwulan sebelumnya**  
Pada triwulan II Tahun 2024 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks SPBE yang dilaksanakan oleh KemenPAN RB, sehingga tidak dapat dibandingkan hasilnya. Hasil Indeks SPBE baru dapat diperoleh pada bulan Desember 2024, dikarenakan assessment penilaian dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2024.
- 3. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II Tahun 2024 dengan target Tahun 2024**  
Capaian realisasi indeks SPBE didapat pada akhir tahun, sehingga pada triwulan II Tahun 2024 belum didapatkan hasil pengukuran Indeks SPBE.
- 4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**  
Pengukuran Indeks SPBE oleh KemenPANRB akan dilaksanakan pada triwulan III dengan hasil final diperoleh pada awal ditahun berikutnya yaitu tahun 2025. Namun demikian, Pusdatin telah melaksanakan beberapa upaya untuk peningkatan Indeks SPBE tahun 2024, antara lain:
  - a. Rapat koordinasi dengan mengundang seluruh TIM Koordinasi SPBE BPOM Tahun 2024 serta kegiatan evaluasi indeks SPBE bersama asesor serta KEMENPANRB, BRIN, dan Kementerian Keuangan, hal ini untuk mendukung peningkatan indeks SPBE BPOM tahun 2024.
  - b. Reviu dan penyusunan kebijakan Manajemen SPBE secara berkala dengan melibatkan unit teknis dan narasumber ahli di bidang SPBE.
  - c. Pusdatin juga melakukan reviu dan penyusunan Peta Rencana dan Arsitektur SPBE setiap tahunnya, yang disesuaikan dengan perubahan proses bisnis dan layanan di BPOM serta Arsitektur SPBE Nasional.
- 5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
Keberhasilan pencapaian kinerja dapat tercapai akibat beberapa kegiatan, antara lain:
  - a. Kegiatan evaluasi terhadap Hasil Indeks SPBE 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2024 Pusdatin bersama seluruh unit teknis yang ada di dalam SK TIM Koordinasi SPBE BPOM Tahun 2024, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan awareness kepada seluruh unit teknis di BPOM sekaligus untuk pembahasan dan reviu terhadap hasil penilaian Indeks SPBE 2023 di tiap

Indikatornya dengan mengundang narasumber yang menjadi TIM Asesor dari Kementerian PAN RB SPBE BPOM tahun 2023 yaitu Bapak Irving Vitra Papatungan dan hari Satriaji dari Universitas Islam Indonesia DIY.

- b. Sosialisasi Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional versi 2 (SIA SPBE v.2) dengan Narasumber dari KemenPANRB yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024. SIA SPBE v.2 ini akan diluncurkan oleh KemenPANRB pada bulan April 2024. Rencananya kedepannya SIA APBE v.2 ini akan digunakan untuk menyimpan arsitektur dan peta rencana SPBE setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) yang nantinya dapat diintegrasikan satu dan lainnya dengan arsitektur SPBE Nasional. Untuk itu seluruh K/L diharuskan memasukkan arsitektur dan peta rencana SPBE yang dimiliki beserta setiap perubahannya.
- c. Pertemuan dengan Tim Enterprise Arsitektur SPBE BPOM Tahun 2024 antara lain dalam kegiatan awareness Arsitektur dan peta Rencana SPBE tahun 2023, dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan persamaan persepsi Tim Enterprise Arsitektur SPBE BPOM Tahun 2024, sehingga dalam proses rewiu dan penyusunan Peta Rencana dan Arsitektur SPBE Tahun 2024 nantinya akan lebih terkoordinasi dan sesuai yang timeline yang ditentukan. Adapun kegiatan awareness ini dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024
- d. Pertemuan Tim Enterprise Arsitektur SPBE BPOM Tahun 2024 untuk pembahasan dan penyusunan Arsitektur dan peta Rencana SPBE tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024
- e. Proses pengesahan dan Koordinasi dengan unit teknis yang belum memberikan verbal pengesahan rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE hasil rewiu tahun 2023
- f. Pertemuan Tim Koordinasi dan Asesor SPBE Badan POM dalam rangka persiapan pelaksanaan evaluasi SPBE Tahun 2024.
- g. Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Kebijakan Manajemen SPBE dengan konsultan SPBE yang telah dilaksanakan sepanjang TW I Tahun 2024 dan masih berlangsung hingga saat ini.
- h. Pelaksanaan survei dan validasi terhadap domain proses bisnis, layanan, aplikasi, infrastruktur, data, dan keamanan dalam rangka rewiu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Badan POM pada tanggal 29 - 30 April 2024

#### **6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Efisiensi anggaran pada triwulan II Tahun 2024 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator. Indikator ini didukung oleh 2 (dua) komponen kegiatan yaitu Pemenuhan Peta Rencana SPBE dan Monev Enterprise Architecture (EA) Badan POM. Pada bulan Mei mengalami perubahan anggaran yang semula Rp.1.223.861.000,-- menjadi Rp.1.229.140.000,--, perubahan ini disebabkan oleh adanya kebutuhan rapat dan pembahasan yang cukup intens dalam koordinasi dengan seluruh unit teknis untuk implementasi SPBE di BPOM sehingga diperlukan penambahan biaya konsumsi rapat di dalam kantor. Hingga bulan Juni realisasi anggaran pada indikator ini adalah Rp.420.421.291,--

## 7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
<b>Kendala/ Permasalahan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih adanya unit kerja yang belum memberikan tanggapan dan masukan terhadap rancangan Kepka Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Tahun 2023 sehingga proses penetapannya masih terkendala.</li> <li>Masih banyak unit teknis yang belum melengkapi survei terkait proses bisnis dan layanan di masing- masing unit kerjanya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih banyak unit teknis yang belum melengkapi survei terkait proses bisnis dan layanan di masing- masing unit kerjanya.</li> <li>Masih ada unit teknis yang belum memberikan respon terhadap rancangan Menejemen SDM SPBE sehingga proses legal drafting.</li> </ol>	Masih unit teknis yang belum melengkapi survei terkait proses bisnis dan layanan di masing- masing unit kerjanya.
<b>Rekomendasi Perbaikan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan unit teknis yang belum melengkapi survei terkait proses bisnis dan layanan</li> <li><i>awareness</i> yang berkelanjutan terkait implementasi SPBE di BPOM</li> <li>Penyusunan dan revisi Kebijakan SPBE</li> </ol>	Rapat Koordinasi bersama Tim Koordinasi SPBE BPOM	-
<b>Rencana Aksi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Evaluasi Hasil Indeks SPBE BPOM Tahun 2023</li> <li>Melakukan Sosialisasi SIA SPBE kepada seluruh Unit Teknis BPOM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Akan dilakukan <i>awareness</i> arsitektur SPBE dan peta rencana Badan POM kepada seluruh anggota tim EA SPBE BPOM 2024</li> <li>Pengesahan SK Tim Koordinasi, Tim Asesor SPBE BPOM 2024</li> <li>Pengesahan SK Tim Penyusunan EA SPBE BPOM 2024</li> <li>Rapat Koordinasi bersama Tim koordinasi SPBE sesuai SK Tim Koordinasi SPBE BPOM 2024</li> </ol>	Dilakukan monev implementasi SPBE BPOM bersama asesor SPBE
<b>Kondisi sebelum Rencana Aksi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum terbentuk TIM SPBE 2024</li> <li>Perlu disusun dan di tetapkan SK Tim SPBE 2024 yang terdiri dari: Tim Koordinasi, Tim Asesor dan Tim Enterprise Arsitektur SPBE Tahun 2024</li> <li>Belum dilakukan Evaluasi Hasil Indeks SPBE BPOM Tahun 2023</li> <li>Perlu dilakukan <i>awarness</i> SPBE dan koordinasi TIM SPBE tahun 2024</li> </ol>		

	5) Perlu dilakukan <i>awarness</i> Arsitektur dan Peta Rencana SPBE kepada Tim Enterprise Arsitektur SPBE Tahun 2024		
<b>Kondisi Setelah Rencana Aksi</b>	1) Melakukan Evaluasi Hasil Indeks SPBE BPOM Tahun 2023 2) Melakukan Sosialisasi SIA SPBE kepada seluruh Unit Teknis BPOM		
<b>Timeline</b>	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
<b>Status</b>	belum close	belum close	belum close

#### 8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, diperoleh informasi bahwa realisasi IKU Tahun 2023 telah tercapai dengan capaian 123,64%. Namun demikian masih terdapat beberapa bagian yang penerapan SPBE nya masih dinilai belum sempurna, sehingga perlu upaya peningkatan lebih lagi.

## SASARAN KEGIATAN 2

### Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM

#### Indeks Kepuasan Layanan TIK

**1. Perbandingan target dan realisasi triwulan II Tahun 2024**

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun.

**2. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2024 dengan triwulan sebelumnya**

Pada triwulan II Tahun 2024 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks Kepuasan Layanan TIK, sehingga tidak dapat dibandingkan hasilnya. Hasil survei kepuasan layanan TIK baru diperoleh pada bulan November 2024. Pengambilan data baru akan dilakukan pada bulan Juli-September 2024.

**3. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II Tahun 2024 dengan target Tahun 2024**

Capaian realisasi Indeks Kepuasan Layanan TIK didapat pada akhir tahun, sehingga pada triwulan II Tahun 2024 belum didapatkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Layanan TIK.

**4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Sudah dilakukan Reviu dan SOP terkait layanan TIK. Untuk pelaksanaan dan Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Layanan TIK akan dilaksanakan pada periode triwulan III - IV 2024 dengan hasil final diperoleh pada akhir tahun 2024. Adapun mekanisme dan tools yang digunakan masih menggunakan tools eksisting

**5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Layanan TIK akan didapatkan pada triwulan IV dengan hasil final diperoleh pada akhir tahun 2024.

**6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Efisiensi anggaran pada triwulan II Tahun 2024 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator. Indikator ini didukung oleh 1 (satu) komponen kegiatan yaitu Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pembangunan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital. Pada bulan Juni mengalami perubahan anggaran yang semula Rp.236.852.000,-- menjadi Rp.353.706.000,--, perubahan ini disebabkan oleh adanya perjalanan dinas luar negeri yang tidak masuk perencanaan sebelumnya, sehingga diperlukan revisi penambahan anggaran. Hingga bulan Juni realisasi anggaran pada indikator ini adalah Rp.210.088.867,--

**7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

Keterangan	April	Mei	Juni
<b>Kendala/ Permasalahan</b>	-	-	-
<b>Rekomendasi Perbaikan</b>	1) Peningkatan layanan infrastruktur TIK antara lain penambahan kuantitas lisensi antivirus berlisensi dan terupdate; 2) Kebutuhan <i>bandwidth</i> internet lebih ditingkatkan untuk memfasilitasi kebutuhan <i>meeting online</i> yang semakin meningkat; 3) Penambahan klausul koneksi internet pada standar infrastruktur TIK untuk mengakomodir kebutuhan <i>bandwidth</i> minimal bagi UPT di daerah; 4) Usulan peningkatan kompetensi teknis jaringan dan <i>troubleshoot</i> perangkat TIK bagi Prakom di UPT dalam rangka merefresh pengetahuan terkini;		

	<p>5) Peningkatan standarisasi pada perangkat TIK di BPOM untuk meningkatkan kinerja dari pegawai BPOM minimal bagi UPT di daerah;</p> <p>6) Pengadaan server untuk UPT di daerah lebih ditingkatkan;</p> <p>7) Adanya dukungan/ pendampingan secara terpusat/ terarah/ terorganisir/ berkelanjutan terkait Layanan TIK di Lingkungan Badan POM;</p> <p>8) Akan dilaksanakan Sosialisasi Standar Infrastruktur TIK BPOM, Standar Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi BPOM dengan tujuan meningkatkan <i>awarness</i> dan pemahaman seluruh unit teknis di BPOM dalam pengajuan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi di lingkungan unit kerjanya.</p>
<b>Rencana Aksi</b>	Revisi <i>tools survey</i> layanan TIK
<b>Kondisi sebelum Rencana Aksi</b>	Reviu dan Revisi <i>tools survey</i> layanan TIK akan dilaksanakan pada Triwulan III
<b>Kondisi Setelah Rencana Aksi</b>	Reviu dan Revisi <i>tools survey</i> layanan TIK akan dilaksanakan pada Triwulan III
<b>Timeline</b>	Akhir Tahun
<b>Status</b>	belum close

#### 8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, diperoleh informasi bahwa realisasi IKU Tahun 2023 telah tercapai dengan capaian 100,29%. Namun demikian masih terdapat revisi *tools survey* layanan TIK agar hasil indeks kepuasan layanan TIK mencapai target maksimal.

**SASARAN KEGIATAN 3**  
**Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal**  
**Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu**

**1. Perbandingan target dan realisasi triwulan II Tahun 2024**

BULAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Januari	94%	99,55%	105,90%	Sangat Baik	Efektif
Februari	94%	99,50%	105,85%	Sangat Baik	Efektif
Maret	95%	98,46%	103,64%	Sangat Baik	Efektif
April	95%	97,99%	103,14%	Sangat Baik	Efektif
Mei	95%	98,18%	103,34%	Sangat Baik	Efektif
Juni	96%	98,59%	102,69%	Sangat Baik	Efektif


Penanganan keluhan layanan TIK adalah penanganan terhadap permasalahan sistem informasi, infrastruktur dan atau database yang dialami pengguna, yang dapat mengganggu keberlangsungan operasional kerja. Ruang lingkup keluhan yang dilaporkan berupa keluhan infrastruktur, aplikasi layanan publik dan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu. Respon *time* adalah waktu yang dibutuhkan untuk merespon penanganan layanan keluhan TIK. Kriteria tepat waktu adalah sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) respon *time* untuk keluhan yang dapat segera ditangani (1 HK) dan maksimal 15 HK apabila memerlukan *sparepart* atau koordinasi dengan pihak eksternal. Indikator ini diperoleh dengan mengukur jumlah keluhan yang dilaporkan dibanding dengan jumlah keluhan yang dapat ditindaklanjuti tepat waktu. Dari capaian triwulan II dapat direalisasikan dengan Sangat Baik, ke depan peningkatan akan terus dilaksanakan guna mencapai target tahunan yang ditetapkan

**2. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2024 dengan triwulan sebelumnya**

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Realisasi TW II	% Capaian TW II
Persentase Keluhan Layanan TIK yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	98,46%	99,95%	98,59%	100,09%

Terdapat peningkatan capaian kinerja pada triwulan II dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I. Dimana triwulan I capaian kinerjanya hanya 99,95% dibandingkan dengan target tahunan, sedangkan pada triwulan II capaian kinerjanya sebesar 100,09% dan sudah melampaui target tahunan yang ditentukan sebesar 98,5%

**3. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II Tahun 2024 dengan target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target TW II	Target Tahunan	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria Terhadap Target tahunan
Persentase Keluhan Layanan TIK yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	96%	98,5%	98,59%	100,09	 Tercapai/Melampaui

Merujuk kepada komitmen Pusdatin dalam melakukan percepatan tindak lanjut terhadap keluhan layanan TIK agar dapat mempermudah pengguna dalam mengakses layanan dan membantu kelancaran pelayanan pengawasan Obat dan Makanan maka semua tim mengupayakan peningkatan koordinasi internal maupun eksternal secara masif serta monitoring dan evaluasi sistem agar capaian target tahun 2024 diharapkan akan tercapai.

**4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Analisa keberhasilan peningkatan kinerja diantaranya

a. Keluhan Infrastruktur:

1) Reviu terhadap Penyediaan Kebutuhan Lisensi dan Perangkat Jaringan

Dalam hal penyediaan lisensi Ms.Office saat ini masih terbatas dan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh pegawai BPOM. Upaya peningkatan penyediaan lisensi ini dengan permohonan penambahan anggaran kepada Biro Perencanaan dan Keuangan. Selain kebutuhan penambahan lisensi Ms.Office dibahas juga terkait kebutuhan penganggaran untuk lisensi Adobe yang pernah menjadi temuan penggunaan Adobe ilegal. Kebutuhan lisensi ini diharapkan dapat dipenuhi untuk meminimalisir penggunaan lisensi yang tidak asli (bajakan), hal ini untuk menghindari ancaman celah keamanan dan untuk pemenuhan kepatuhan sesuai dalam Keputusan Kepada BPOM No.444 tahun 2023 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan BPOM.

2) Koordinasi berkelanjutan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan keluhan TIK

Koordinasi berkelanjutan dengan pihak-pihak terkait dilakukan untuk pemenuhan layanan keluhan infrastruktur dapat segera ditangani. Koordinasi yang dilaksanakan dapat dilakukan melalui daring (grup chat) dan/atau luring (rapat). Koordinasi ini untuk meningkatkan sinergitas layanan kepada seluruh stakeholder. Hal ini juga dilakukan untuk perbaikan berkelanjutan.

b. Keluhan e-bpom:

Telah dilakukan koordinasi dengan Unit Teknis Pusat dan Balai di lingkungan Badan POM serta Kementerian Lembaga yang terkait terutama dengan Lembaga National Single Window (LNSW) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Hal ini diperlukan karena kendala yang terjadi melibatkan aliran data yang saling dipertukarkan antar Kementerian/Lembaga dalam suprasistem integrasi data. Dalam konteks ini, koordinasi dilakukan untuk mempercepat respon terhadap pengguna layanan, serta memastikan bahwa masalah-masalah teknis dapat diselesaikan dengan cepat. Koordinasi ini tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah operasional, tetapi juga bertujuan untuk mendukung sinergitas layanan yang disampaikan kepada masyarakat. Tim Koordinasi yang dibentuk bertugas untuk memfasilitasi dialog terbuka antara semua pihak terlibat, baik melalui grup diskusi maupun melalui pertemuan/rapat koordinasi. Tujuannya adalah untuk mempercepat solusi terhadap keluhan-keluhan tertentu yang mungkin muncul dalam implementasi aplikasi e-BPOM dan aliran data terkait di lingkungan suprasistem integrasi data Kementerian/Lembaga. Selain itu, koordinasi ini juga memberikan masukan yang berharga dalam pengembangan kebijakan yang saling berkaitan di berbagai bidang terkait. Ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja sistem, serta memberikan saran-saran perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam penanganan keluhan terkait TIK di masa yang akan datang.

c. Keluhan SIPT:

Dalam penanganan keluhan SIPT, penanganan keluhan yang cepat dengan melakukan strategi pengendalian terutama pada keluhan yang menyebabkan tindak-lanjut dan analisa yang lama. Penjadwalan dan upaya dalam merespon dan menindaklanjuti terhadap keluhan minor diusahakan sesegera mungkin. Upaya Pusdatin dalam mengurangi keluhan yaitu dengan perbaikan dan penyempurnaan fitur-fitur agar mempermudah dan mempercepat pengguna dalam akses layanan dan output yang

diinginkan. Serta dukungan lain yaitu pelaksanaan bimbingan teknis yang dilakukan kepada UPT.

#### 5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja dapat tercapai akibat beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Sentralisasi permohonan dan pengaduan layanan TIK Pusdatin terpusat pada aplikasi *help pusdatin* serta movev secara rutin;
- b. Melakukan intensifikasi penanganan keluhan dalam bentuk bimbingan teknis, dan diseminasi informasi terkait layanan Pusdatin;
- c. Kegiatan layanan helpdesk yang dilakukan secara rutin baik secara luring maupun daring oleh petugas yang terlatih dan kompeten;  
Pelaksanaan helpdesk yang tidak hanya dibuka luring tapi juga daring sehingga memudahkan pengguna dalam penyampaian keluhan didukung oleh petugas yang kompeten, ramah, dan solutif sehingga diharapkan akan menimbulkan pandangan positif bagi kalangan pengguna terhadap layanan keluhan TIK.
- d. Penyusunan kebijakan layanan TIK yang disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan seluruh *stakeholder* Pusdatin.

#### 6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Keluhan Layanan TIK yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	1.298.103.000	767.053.800	59,09%	98,59%	92% (efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **telah efisien** karena capaian indikator sudah lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Salah satu hal yang menyebabkan tingkat efisiensinya mencapai kriteria efisien adalah telah dilaksanakannya berbagai kegiatan pendukung diantaranya pembahasan atau rapat bersama untuk peningkatan layanan keluhan sehingga indikator ini mencapai target sesuai yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakannya komunikasi serta koordinasi untuk membahas kendala terhadap keluhan-keluhan tertentu yang mungkin muncul sehingga dapat ditemukan solusi dan dapat mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya

#### 7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan, Pusdatin telah melakukan beberapa tindak lanjut, antara lain:

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	<p>Layanan aplikasi e-BPOM:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat kendala pada proses realisasi impor khususnya post border</li> <li>2. Terdapat kendala perubahan integrasi data SKI/SAS antara e-BPOM dengan Sistem INSW terkait perubahan mekanisme aliran data SKI/SAS ke Sistem INSW Generasi I menjadi dialirkan ke Sistem INSW Generasi II</li> </ol> <p>Layanan Infrastruktur:</p> <p>Terdapat keterbatasan penyediaan perangkat dan lisensi software untuk pegawai, sehingga permohonan ataupun pengaduan belum dapat dipenuhi seluruhnya.</p> <p>Layanan SIPT:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya permohonan rollback karena kesalahan entri oleh UPT, akibat ketidaktelitian pengisian mengakibatkan dibutuhkan waktu dalam melakukan rollback.</li> <li>2. Terdapat beberapa produk kosmetik yang teregistrasi di CekBPOM belum muncul saat operator melakukan pengisian form sampling</li> </ol>		

Keterangan	April	Mei	Juni
Rekomendasi Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan fungsionalitas aplikasi Help Pusdatin sesuai masukan user</li> <li>2. Sosialisasi dan bimbingan terkait kebijakan TIK, penggunaan aplikasi serta penyampaian keluhan dan permohonan melalui Help Pusdatin;</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi penanganan keluhan layanan TIK yang diselesaikan tepat waktu melalui Help Pusdatin</li> <li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebutuhan penyediaan perangkat dan lisensi software serta melaksanakan pembahasan bersama Biro Perencanaan dan Keuangan terkait kebutuhan alokasi anggaran terkait.</li> </ol>		
Rencana Aksi	<p>Layanan Aplikasi e-BPOM:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi penyebab utama kendala data realisasi impor belum ada izin HS Code yang beririsan antara Badan POM dengan Kementerian/Lembaga lain</li> <li>2. Mengidentifikasi penyebab utama kendala integrasi data SKI/SAS antara e-BPOM dengan Sistem INSW terkait penerapan Sistem INSW Generasi II</li> </ol> <p>Layanan Infrastruktur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan rapat pembahasan alokasi anggaran penyediaan lisensi software bersama Biro Perencanaan dan Keuangan.</li> <li>2. Menyampaikan jawaban terkait permohonan lisensi jika tidak dapat difasilitasi oleh Pusdatin, merujuk pada surat Biro Perencanaan dan Keuangan bahwa masing-masing satker dapat mengalokasikan anggaran untuk pembelian lisensi sesuai kebutuhan.</li> <li>3. Melakukan sosialisasi terkait layanan infrastruktur dan hasil reviu Keputusan Kepala BPOM tentang Standar Infrastruktur TIK BPOM</li> </ol> <p>Layanan SIPT:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar UPT dalam permintaan rollback ditandatangani oleh kepala UPT diketahui oleh rorenkeu dan unit pengampu. Hal ini untuk menimbulkan efek kehati-hatian dalam melakukan entri SIPT</li> <li>2. Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi UPT</li> <li>3. Perbaikan aplikasi khususnya terkait sampling fortifikasi</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi terhadap scheduler update data dengan CekBPOM</li> </ol>		
Kondisi sebelum Rencana Aksi	<p>Layanan Aplikasi e-BPOM:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terdapatnya filtering yang membedakan HS Code antara Badan POM dengan Kementerian lainnya pada aplikasi Ciesa DJBC</li> <li>2. Integrasi data SKI/SAS dalam rangka penerapan Sistem INSW Generasi II antara e-BPOM dan Sistem INSW mengalami kendala sehingga perlu diidentifikasi lebih lanjut</li> </ol> <p>Layanan Infrastruktur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran untuk penyediaan lisensi Ms.Office saat ini baru dapat terpenuhi sebanyak 300 lisensi, dengan total penggunaan sebanyak 1000 perangkat terinstall. Hal ini tentu belum dapat mencukupi kebutuhan seluruh pegawai BPOM.</li> <li>2. Pusdatin tidak dapat memberikan anggaran pembelian lisensi Adobe kepada unit kerja lain karena keterbatasan anggaran.</li> <li>3. Lisensi yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan seluruh pegawai di BPOM.</li> <li>4. Pemenuhan kebutuhan jaringan LAN untuk setiap pegawai, dengan ketentuan bahwa setiap pegawai mendapatkan satu jaaringan LAN.</li> </ol> <p>Layanan SIPT:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Frekuensi permohonan rollback yang begitu tinggi dari Unit Kerja khususnya permasalahan kesimpulan fortifikasi.</li> <li>2. Beberapa data produk kosmetik yang teregistrasi belum muncul</li> </ol>		
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<p>Layanan Aplikasi e-BPOM:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukan koordinasi antara Badan POM dengan DJBC terkait pembahasan penambahan field peruntukan (spesifikasi wajib atau kriteria mutu) Obat dan Makanan dengan DJBC. Namun DJBC perlu melakukan koordinasi dengan LNSW dan Kementerian/Lembaga lain</li> <li>2. Penyebab utama kendala integrasi data SKI/SAS antara e-BPOM dan Sistem INSW telah teridentifikasi karena adanya perbedaan elemen data antara Sistem INSW Gen I dengan Sistem INSW Gen II, serta perbedaan mekanisme pertukaran data yang sebelumnya menggunakan XML menjadi Json</li> </ol>		

Keterangan	April	Mei	Juni
	Layanan Infrastruktur: 1. Setiap satker membuat alokasi anggaran untuk pembelian lisensi software untuk kebutuhan pegawai di unitnya sehingga setiap pegawai mendapatkan satu lisensi Ms.Office untuk perangkat kerja yang digunakannya. 2. Setiap unit kerja yang membutuhkan dapat melakukan pembelian lisensi Adobe sesuai kebutuhan masing-masing unit kerja dengan alokasi anggaran di setiap satker terkait. 3. Penyediaan satu jaringan LAN untuk setiap pegawai BPOM (No One Left Behind).  Layanan SIPT: 1. Di TW II ini khususnya sejak Bulan Juni sudah tidak ada keluhan terkait permohonan rollback terkait fortifikasi. 2. Melakukan penelusuran dan mencari root cause tidak mengalirnya data produk kosmetik pada SIPT 3. Telah dikembangkan fitur untuk sinkronisasi data per nomor izin edar pada sisi Admin		
Timeline	Layanan aplikasi e-BPOM	Akhir Tahun 2024	
	Layanan Infrastruktur	Akhir Tahun 2024	
	Layanan Aplikasi SIPT	Akhir Tahun 2024	
Status	Layanan aplikasi e-BPOM	Belum close	
	Layanan Infrastruktur	Belum close	
	Layanan Aplikasi SIPT	Belum close	

## 8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, diperoleh informasi bahwa realisasi IKU Tahun 2023 telah tercapai dengan capaian 102,52%. Namun demikian masih terdapat beberapa keluhan yang belum ditindaklanjuti, sehingga perlu perbaikan dalam penanganan keluhan agar semua keluhan dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu.

### Persentase Pemenuhan *Bussines Continuity Management*

#### 1. Perbandingan target dan realisasi triwulan II Tahun 2024

BULAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Januari	45,5%	45,5%	100%	Baik	Efektif
Februari	45,5%	48,70%	107,03%	Sangat Baik	Efektif
Maret	50%	58,3%	116,6%	Sangat Baik	Efektif
April	50%	58,3%	116,6%	Sangat Baik	Efektif
Mei	55%	63,1%	114,72%	Sangat Baik	Efektif
Juni	55%	63,1%	114,72%	Sangat Baik	Efektif

Sampai dengan triwulan II, indikator ini telah melakukan backup ke DRC terhadap aplikasi sebagai berikut:

- 1) Asrot
- 2) Standarpangan
- 3) e-Reg
- 4) e-Reg RBA
- 5) SIASN
- 6) Sireka

- 7) SIAP UK
- 8) ITSM
- 9) Portal Satu Data
- 10) BCC
- 11) Perpustakaan


Dengan demikian, capaian persentase pemenuhan *business continuity management* (BCM) pada triwulan II tahun 2024 telah mencapai target triwulan II yang ditetapkan yaitu 63,1% dengan kriteria SANGAT BAIK.

**2. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2024 dengan triwulan sebelumnya**

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Realisasi TW II	% Capaian TW II
Persentase Pemenuhan <i>Business Continuity Management</i>	58,3%	77,73%	63,1%	84,13%

Terdapat peningkatan capaian kinerja pada triwulan II dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I. Dimana triwulan I capaian kinerjanya hanya 77,73% dibandingkan dengan target tahunan, sedangkan pada triwulan II capaian kinerjanya sebesar 84,13% dari target tahunan sebesar 75%

**3. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II Tahun 2024 dengan target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target TW II	Target Tahunan	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria Terhadap Target tahunan
Persentase Pemenuhan <i>Business Continuity Management</i> (BCM)	55%	75%	63,1%	84,13%	 Akan Tercapai

Realisasi persentase pemenuhan *business continuity management* (BCM) triwulan II Tahun 2024 belum mencapai target Tahun 2024 dengan kriteria **Akan Tercapai**. Namun demikian capaian per bulan sudah mencapai target yang telah di tentukan.

**4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Target Pemenuhan BCM pada periode Triwulan 1 Tahun 2024 telah berhasil dicapai sesuai dengan perencanaan, dengan analisis penyebab keberhasilan didukung:

- a. Semakin meningkatnya awareness keamanan pic masing-masing aplikasi terhadap kebutuhan backup data.
- b. Pembentukan Tim Pemulihan Krisis Tahun 2024 yang disyahkan pada tanggal 28 Februari 2024.
- c. Update Pedoman BCP terbaru yang telah direviu dan disyahkan pada bulan Mei 2024.
- d. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang rutin dilaksanakan. Pada awal tahun 2024 telah dilaksanakan perencanaan pemenuhan BCM melibatkan PIC aplikasi serta evaluasi pemanfaatan DRC tahun 2023 untuk meninjau kembali strategi yang diperlukan dalam mewujudkan target.
- e. Komitmen penuh seluruh PIC aplikasi yang mendukung keberhasilan capaian pemenuhan BCM, salah satunya adalah semakin meningkatkan kebutuhan DRC sebagai sarana pencadangan dan recovery jika terjadi insiden TIK.
- f. Sehubungan dengan kejadian insiden siber di PDNs 2 maka telah dilakukan kegiatan mitigasi dengan restore bertahap ke fasilitas PDNs 3.

## 5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang mendukung capaian Pemenuhan BCM antara lain:

- Kegiatan Monev Pemanfaatan DRC berkala yang melibatkan PIC aplikasi.
- Kegiatan awareness keamanan yang semakin baik terhadap kebutuhan pencadangan file seiring dengan terjadinya insiden siber yang menyebabkan kerusakan data aplikasi.

## 6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Pemenuhan Business Continuity Management (BCM)	351.330.000	160.562.000	45,70%	63,1%	95% (efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **telah efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Perlu dilakukan percepatan realisasi anggaran agar anggaran yang dikeluarkan dapat mendukung tercapainya target IKU di akhir tahun.

## 7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
<b>Kendala/Permasalahan</b>	-	-	-
<b>Rekomendasi Perbaikan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perencanaan terhadap aplikasi apa saja yang akan di backup berdasarkan tingkat klasifikasi kerentanan serangan aplikasi tersebut;</li> <li>Melakukan pelaksanaan backup sesuai dengan perencanaan.</li> <li>Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan backup secara berkala; dan</li> <li>Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan, bimtek, dan seminar/workshop.</li> </ol>		
<b>Rencana Aksi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan rapat perencanaan pemanfaatan DRC</li> <li>Menyusun rencana kinerja pemenuhan BCP melalui pemanfaatan DRC</li> <li>Melaksanakan monev capaian 2023</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan Kominfo terkait permohonan pemanfaatan PDNs 2</li> <li>Penyampaian surat permintaan usulan nama anggota Tim Pemulihan Krisis TIK</li> <li>Finaslisasi Draft SK Tim Pemulihan Krisis TIK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Monev pemanfaatan DRC TW 1 Tahun 2024</li> <li>Sharing knowledge Optimalisasi Pemanfaatan DRC</li> <li>Pengusulan kepada MR Reviu Pedoman BCP Terkini</li> </ol>
<b>Kondisi sebelum Rencana Aksi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum ada perencanaan tahun 2024</li> <li>Belum dilaksanakan rapat monev pemanfaatan DRC Tahun 2023</li> <li>Belum dilakukan finalisasi draft hasil Reviu Dokumen BCP Tahun 2024</li> <li>Belum adanya Tim Pemulihan Krisis TIK Badan POM</li> </ol>		
<b>Kondisi Setelah Rencana Aksi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Telah dimiliki perencanaan pemanfaatan DRC Tahun 2024</li> <li>Telah tersedia rencana kegiatan untuk mendukung capaian target pemenuhan BCP tahun 2024</li> </ol>	<p>Telah dibentuk Tim Pemulihan Krisis TIK Badan POM Tahun 2024 dan telah dilaksanakan koordinasi awal untuk menyamakan tugas dan persepsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diperoleh capaian pemanfaatan DRC TW 1 Tahun 2024</li> <li>Telah dilaksanakan kegiatan Sharing knowledge Optimalisasi Pemanfaatan DRC</li> <li>Update Pedoman BCP Terkini</li> </ol>
<b>Timeline</b>	1 bulan	1 bulan	1 bulan
<b>Status</b>	Close	Close	Close

## 8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, diperoleh informasi bahwa realisasi IKU Tahun 2023 telah tercapai dengan capaian 116,67%. Untuk mencapai target akhir periode Renstra 2020-2024, maka masih diperlukan peningkatan mencakup percepatan pemanfaatan DRC di PDNs secara optimal.

## Indeks CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*)

1. **Perbandingan target dan realisasi triwulan II Tahun 2024**  
Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun dan dilakukan oleh BSSN.
2. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2024 dengan triwulan sebelumnya**  
Pada triwulan II Tahun 2024 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks CSIRT yang dilaksanakan oleh BSSN, sehingga tidak dapat dibandingkan hasilnya. Hasil indeks CSIRT baru diperoleh pada bulan Desember 2024, dikarenakan assessment penilaian dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2024.
3. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan II Tahun 2024 dengan target Tahun 2024**  
Capaian realisasi Indeks CSIRT didapat pada akhir tahun, sehingga pada triwulan II Tahun 2024 belum didapatkan hasil pengukuran Indeks CSIRT.
4. **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**  
Pengukuran Indeks CSIRT oleh BSSN direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III dengan hasil final diperoleh pada bulan Desember 2024. Namun demikian, Pusdatin telah kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian nilai *cyber maturity assessments* (CSM) dan tingkat maturitas penanganan insiden (TMPI), antara lain: peningkatan kompetensi, kepatuhan terhadap SMKI, serta reuiu pedoman keamanan informasi.
5. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
Keberhasilan penilaian indeks CSIRT adalah realisasi kegiatan-kegiatan yang menunjang nilai kematangan penanganan insiden serta kesiapan data dukung yang mampu disajikan pada saat penilaian. Sehingga perlu dilakukan verifikasi dan monitoring tindak lanjut hasil rekomendasi penilaian tahun 2023 sebelum penilaian indeks CSIRT Tahun 2024.
6. **Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**  
Efisiensi anggaran pada triwulan II Tahun 2024 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator. Indikator ini didukung oleh 3 (tiga) komponen kegiatan yaitu Monev Pusat Keamanan Data dan Informasi, Peningkatan Maturitas Penanganan Insiden dan Koordinasi Pemenuhan Government CSIRT. Pada bulan Mei mengalami perubahan anggaran yang semula Rp.1.612.692.000,-- menjadi Rp.1.662.692.000,--, perubahan ini disebabkan oleh adanya penambahan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan pertemuan Tim BPOM CSIRT seluruh Indonesia secara luring di Jakarta. Hingga bulan Juni realisasi anggaran pada indikator ini adalah Rp.874.224.909,--
7. **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

Keterangan	April	Mei	Juni
<b>Kendala/Permasalahan</b>	-	-	-
<b>Rekomendasi Perbaikan</b>	Mencakup penyempurnaan kebijakan, peningkatan kapabilitas pegawai, dan penerapan prosedur baru untuk mengatasi temuan evaluasi sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memastikan kesinambungan peningkatan kinerja CSIRT ke depan.		
<b>Rencana Aksi</b>	Melakukan reuiu tim CSIRT Tahun 2023	1) Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi <i>assessment</i> TMPI Tahun 2023 2) Penyampaian permintaan usulan	1) Pembuatan draft SK Tim CSIRT 2) Proses pelaksanaan pengadaan antivirus end user

Keterangan	April	Mei	Juni
		nama anggota tim CSIRT 2024 3) Monev tim CSIRT Tahun 2024	3) Proses pelaksanaan pengadaan antivirus server
<b>Kondisi sebelum Rencana Aksi</b>	1) Belum menetapkan Tim POM CSIRT 2024 2) Progress pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penilaian TMPI dan CSM belum dimonitor 3) Belum dilaksanakan peningkatan kompetensi berjenjang		
<b>Kondisi Setelah Rencana Aksi</b>	Pelaksanaan Reviu Tim CSIRT Tahun 2023	1) Telah dilaksanakan Moev Tim CSIRT Tahun 2023 2) Monitoring hasil kerja sama degan BSSN 3) Penyusunan dokumen Manajemen Resiko Keamanan SPBE 4) Reviu SOP penanganan insiden, dan ITSA	1) Perpanjangan lisensi Anti Virus Server 2) Verifikasi kelengkapan data dukung penilaian CSM 3) Verbal SK CSIRT 2024 telah diusulkan ke Hukor
<b>Timeline</b>	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan
<b>Status</b>	Close	Close	Close

## 8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, diperoleh informasi bahwa realisasi IKU Tahun 2023 telah tercapai dengan capaian 110,75%. Namun demikian masih memerlukan peningkatan mencakup penyempurnaan kebijakan, peningkatan kapabilitas pegawai, dan penerapan prosedur baru untuk mengatasi temuan evaluasi sebelumnya

### Jumlah Data Berbagi Pakai

#### 1. Perbandingan target dan realisasi triwulan II Tahun 2024

BULAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Januari	2	2	100%	Baik	Efektif
Februari	4	4	100%	Baik	Efektif
Maret	6	6	100%	Baik	Efektif
April	8	8	100%	Baik	Efektif
Mei	10	10	100%	Baik	Efektif
Juni	15	15	100%	Baik	Efektif

Sampai triwulan II indikator jumlah data berbagi pakai telah merealisasikan 15 (lima belas) data yang berhasil dibagipakaikan yaitu:

- Persentase produk obat produksi dalam negeri dan impor;
- Persentase produk suplemen kesehatan lokal dan impor;
- Data sarana produksi produk obat yang bersertifikat cara pembuatan obat yang baik (CPOB);
- Jumlah nomor izin edar kosmetika;
- Jumlah dan sebaran sarana IRTP setiap kabupaten dan kota; dan
- Jumlah SPPIRT setiap kabupaten/kota
- Data Sarana PBF

- h. Data Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan (KP) Tahun 2019 - 2023
- i. Data Produk - OTOKSK
- j. Data Industri Farmasi yang Memiliki Sertifikat CPOB
- k. Data Surat Persetujuan Fasilitas Bersama (FasBer) CPOB
- l. Data KFA OT, SK, OK
- m. Data Industri Farmasi
- n. Jumlah Nomor Izin Edar Obat
- o. Jumlah Nomor Izin Edar Obat Tradisional


Dengan demikian, capaian jumlah data berbagi pakai pada triwulan II tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % dengan kriteria BAIK.

**2. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2024 dengan triwulan sebelumnya**

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Realisasi TW II	% Capaian TW II
Jumlah Data Berbagi Pakai	4	13,33%	15	50%

Terdapat peningkatan capaian kinerja pada triwulan II dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I. Dimana triwulan I capaian kinerjanya hanya 13,33% dibandingkan dengan target tahunan, sedangkan pada triwulan II capaian kinerjanya sebesar 50% dari target tahunan yang telah ditentukan sebesar 30.

**3. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II Tahun 2024 dengan target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target TW II	Target 2024	Realisasi TW II	%Capaian	Kriteria Terhadap Target Tahunan
Jumlah Data Berbagi Pakai	15	30	15	50%	 Perlu Upaya Keras

Realisasi jumlah data berbagi pakai triwulan II Tahun 2024 belum mencapai target Tahun 2024 dengan kriteria **Perlu Upaya Keras**. Namun demikian capaian per bulan sudah mencapai target yang telah di tentukan.

**4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Dalam mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka dilakukan penyusunan Indikator Jumlah Data Berbagi Pakai khususnya untuk penyebarluasan data hasil pengolahan data di Badan POM. Dalam pelaksanaannya, Pusdatin juga melibatkan unit kerja terkait selaku produsen data untuk konfirmasi elemen data, sifat kerahasiaan dan validasi data. Adanya Surat Keputusan Tim Koordinasi Satu Data BPOM Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk komitmen setiap unit kerja untuk mendukung implementasi Satu Data BPOM untuk dikorelasikan dengan kinerja ini. Bentuk komitmen ini dilanjutkan dengan pertemuan / koordinasi. Kerja sama dan masukan yang baik dari unit kerja menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan indikator Jumlah Data Berbagi Pakai. Selain menjalin kerja sama dengan unit kerja, telah dilaksanakan pula pertemuan dengan Kementerian / Lembaga lain yang mengajukan permohonan data BPOM melalui Portal Satu Data BPOM dan adanya keikutsertaan BPOM dalam Forum Koordinasi Satu Data Indonesia. Adanya kerja sama yang baik dengan unit kerja dan Kementerian / Lembaga lain mendukung tercapainya target indikator Jumlah Data Berbagi Pakai.

## 5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja :

- Telah dilaksanakan pertemuan / diskusi dengan unit kerja terkait terhadap permohonan data; dan
- Telah dilaksanakan pertemuan dan koordinasi dengan Kementerian / Lembaga terkait terhadap kebutuhan data di Badan POM.

## 6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah Data Berbagi Pakai	831.706.000	256.966.003	30,90%	50%	90% (efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **telah efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Salah satu hal yang menyebabkan tingkat efisiensinya mencapai kriteria efisien adalah.....

## 7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
<b>Kendala/ Permasalahan</b>	-	-	-
<b>Rekomendasi Perbaikan</b>	-	-	-
<b>Rencana Aksi</b>	1. Koordinasi dengan unit kerja terkait (produsen data) terhadap adanya permohonan data di Portal Satu Data BPOM 2. Koordinasi dengan unit kerja terkait (pemohon data) dan Kementerian terkait dalam hal kebutuhan data		
<b>Kondisi sebelum Rencana Aksi</b>	Adanya permohonan data / API dari unit teknis dan atau Kementerian / Lembaga		
<b>Kondisi Setelah Rencana Aksi</b>	Telah tersedianya data / API yang siap dibagipakaikan		
<b>Timeline</b>	Akhir Tahun 2024	Akhir Tahun 2024	Akhir Tahun 2024
<b>Status</b>	Belum Close	Belum Close	Belum Close

## 8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, diperoleh informasi bahwa realisasi IKU Tahun 2023 telah tercapai dengan capaian 100%. Informasi ini dimanfaatkan untuk melakukan penambahan target data yang akan dibagipakaikan pada tahun 2024. Selain itu Laporan kinerja membantu mengukur atau menilai sejauh mana target Indikator Jumlah Berbagi Pakai tercapai. Dengan adanya proses monitoring setiap bulan membantu untuk memastikan tercapainya pengukuran kinerja.

## Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir

### 1. Perbandingan target dan realisasi triwulan II Tahun 2024

BULAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Januari	8%	7,41%	92,62%	Cukup	Kurang Efektif
Februari	16%	18,52%	115,75%	Sangat Baik	Efektif
Maret	28%	30%	107,14%	Sangat Baik	Efektif
April	36%	40,74%	113,16%	Sangat Baik	Efektif
Mei	44%	48,15%	109,43%	Sangat Baik	Efektif
Juni	52%	55,56%	106,84%	Sangat Baik	Efektif

Sampai triwulan II indikator persentase data dan informasi yang mutakhir telah merealisasikan 12 (dua belas) dashboard yang dibuat yaitu:

- a. Dashboard Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan POM - Modul Profil
- b. Dashboard Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan POM - Modul Evaluasi Pembayaran
- c. Dashboard Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan POM - Modul jasa
- d. Dashboard Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan POM - Modul Permohonan
- e. Dashboard Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan POM - Modul Pembayaran Billing dan Invoice
- f. Dashboard Peta Persebaran KIE - Modul KIE Provinsi
- g. Dashboard Peta Persebaran KIE - Modul KIE Kab Kota
- h. Dashboard Peta Persebaran KIE - Modul KIE Eselon 1
- i. Dashboard Patroli Siber Tren Statistik Link yang di-Takedown
- j. Dashboard Patroli Siber Tren Statistik Komoditi yang di Takedown
- k. Dashboard Patroli Siber Tren Statistik Kerugian Ekonomi
- l. Dashboard Sistem Informasi Layanan Eksternal – ITSM


Dengan demikian, walaupun bulan Januari belum mencapai target yang telah ditentukan, namun capaian persentase data dan informasi yang mutakhir pada triwulan II tahun 2024 telah mencapai target triwulan II yang ditetapkan yaitu 106,84 % dengan **kriteria SANGAT BAIK**.

### 2. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2024 dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Realisasi TW II	% Capaian TW II
Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	30%	30%	55,56%	55,56%

Terdapat peningkatan capaian kinerja pada triwulan II dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I. Dimana triwulan I capaian kinerjanya hanya 30% dibandingkan dengan target tahunan, sedangkan pada triwulan II capaian kinerjanya sebesar 55,56% dari target tahunan yang telah ditentukan sebesar 100%.

### 3. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II Tahun 2024 dengan target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target TW II	Target Tahunan	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria Terhadap Target Tahunan
Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	52%	100%	55,56%	55,56%	 Perlu Upaya Keras

Realisasi persentase data dan informasi yang mutakhir triwulan II Tahun 2024 belum mencapai target Tahun 2024 dengan kriteria **Perlu Upaya Keras**. Namun demikian capaian per bulan sebagian besar sudah mencapai target yang telah di tentukan.

### 4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pengembangan data dan informasi BPOM Command Center (BCC) merupakan kegiatan pengembangan muatan data dan informasi strategis dan penyempurnaan data-data eksisting yang ditayangkan dari seluruh unit teknis. Penyempurnaan data dan informasi akan bersumber dari datalake dan menggunakan tableau sebagai tools dalam visualisasi dashboard di BCC. Kegiatan penyempurnaan dan pengembangan data strategis akan melibatkan tim koordinasi BCC yang terdiri dari seluruh unit teknis pusat di Badan POM. Pada tahun TW 2 2024, BCC telah menyelesaikan pengembangan dashboard data dan informasi strategis sebanyak 12 dashboard, dimana dashboard *existing* telah selesai di-*redesign* menggunakan *business intelligence tools* Tableau. Jumlah dashboard yang dikembangkan dan dipelihara Triwulan 2 tahun 2024 ini sesuai target per Triwulan namun memang belum memenuhi target tahunan, dengan capaian sebesar 55.56%. Dalam proses pengembangan saat ini sumber data dashboard akan menggunakan teknologi *Big Data*, salah satunya menggunakan teknologi terbaru yang menghasilkan aliran data yang lebih cepat.

### 5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Adanya penambahan informasi yang ditayangkan sebagai dashboard informasi pada BCC dan telah dilaksanakan Pengembangan Dashboard BCC, dimana dashboard *existing* telah selesai di-*redesign* menggunakan *business intelligence tools* Tableau.

### 6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	592.675.000	186.930.500	31,54%	55,56%	90% (efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **telah efisien** karena capaian indikator sudah lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Salah satu hal yang menyebabkan tingkat efisiensinya mencapai kriteria efisien adalah telah dilaksanakannya berbagai macam kegiatan serta rapat untuk terkait pembahasan dashboard yang ada di BCC ataupun informasi yang ditampilkan pada WebGIS.

### 7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	-	-	-
Rekomendasi Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pemutakhiran dashboard BCC dilakukan dengan melakukan inventarisasi dashboard informasi yang telah tersedia;</li> <li>Melakukan analisis kebutuhan informasi strategis baik dalam lingkup internal, maupun melalui rapat koordinasi bersama unit kerja terkait; dan</li> <li>Sentralisasi sumber data dashboard menggunakan tool singlestore.</li> </ol>		

Keterangan	April	Mei	Juni
<b>Rencana Aksi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan monitoring bulanan terkait verifikasi dashboard yang ada di BCC untuk memastikan informasi yang tayang telah dimutakhirkan;</li> <li>2. Dilakukan Rapat Reviu Dashboard BCC yang mengundang setiap unit kerja produsen data atau pemilik aplikasi;</li> <li>3. <i>Redesign</i> dashboard pada BCC dengan perubahan sumber data ke Database Singlestore.</li> </ol>		
<b>Kondisi sebelum Rencana Aksi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih ada beberapa dashboard yang informasinya belum termutakhirkan</li> <li>2. Terdapat beberapa dashboard pada BCC yang sudah tidak diperlukan oleh unit kerja</li> <li>3. Dashboard yang ada beberapa masih terkoneksi ke database lama yaitu <i>hive</i></li> </ol>		
<b>Kondisi Setelah Rencana Aksi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dashboard yang ada beberapa datanya sudah termutakhirkan</li> <li>2. Telah terinventarsasi untuk dashboard Kesestamaan dan dan Ittama</li> <li>3. Dashboard Kesestamaan dan dan Ittama dalam proses perubahan sumber data ke database singlestore</li> </ol>		
<b>Timeline</b>	Akhir tahun 2024	Akhir tahun 2024	Akhir tahun 2024
<b>Status</b>	Belum Close	Belum Close	Belum Close

#### 8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja membantu mengukur atau menilai sejauh mana target persentase data dan informasi yang mutakhir akan tercapai. Adanya proses monitoring setiap bulan membantu untuk memastikan tercapainya pengukuran kinerja ini.

## SASARAN KEGIATAN 4 Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

### Persentase sistem informasi pengawasan obat dan makanan terintegrasi dan *realtime*

#### 1. Perbandingan target dan realisasi triwulan II Tahun 2024

BULAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Januari	85%	86,73%	102,03%	Sangat Baik	Efektif
Februari	85%	87,61%	103,07%	Sangat Baik	Efektif
Maret	86%	88,5%	102,90%	Sangat Baik	Efektif
April	86%	89,38%	103,93%	Sangat Baik	Efektif
Mei	87%	94,69%	108,83%	Sangat Baik	Efektif
Juni	87%	97,35%	118,96%	Sangat Baik	Efektif

Cakupan integrasi diantaranya yaitu integrasi dengan gateway Tanda Tangan Elektronik (TTE BSre), e-payment, Datalake (sebagai source Satu Data BPOM), Gateway Covid, SIAN, BCC (Badan POM Operational Centre), dan *Online Single Submission* (OSS). Pencapaian indikator tersebut sudah melebihi target yang ditentukan dengan kriteria SANGAT BAIK. Capaian realisasi indikator akan terus dipertahankan dan dijaga kualitasnya mengingat integrasi ini telah menjadi kebutuhan di Badan POM, sebagai pemenuhan efisiensi bisnis proses di Badan POM.


Dengan demikian, capaian persentase sistem informasi pengawasan obat dan makanan terintegrasi dan *realtime* pada triwulan II tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 110,60% dengan kriteria SANGAT BAIK.

#### 2. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2024 dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Realisasi TW II	% Capaian TW II
Persentase sistem informasi pengawasan obat dan makanan terintegrasi dan <i>realtime</i>	88,5%	102,90%	97,35%	118,96%

Terdapat peningkatan capaian kinerja pada triwulan II dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I. Dimana triwulan I capaian kinerjanya hanya 88,5% dibandingkan dengan target tahunan, sedangkan pada triwulan II capaian kinerjanya sebesar 97,35% dari target tahunan yang telah ditentukan sebesar 100%.

#### 3. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II Tahun 2024 dengan target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target TW II	Target Tahunan	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria Terhadap Target tahunan
Persentase sistem informasi pengawasan obat dan makanan terintegrasi dan <i>realtime</i>	87%	100%	97,35%	97,35	 Akan Tercapai

Sistem informasi pengawasan obat dan makanan telah memenuhi target terintegrasi secara realisasi pada Triwulan II ini, tetapi belum mencapai target akumulatif tahun 2024. Hal ini dikarenakan, pencapaian target ini merujuk kepada komitmen Pusdatin dalam melakukan integrasi sistem informasi sesuai perencanaan yang tercantum pada Rencana Strategis 2020-2024 dan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 serta terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan strategis di lingkungan Badan POM.

Target per tahun hingga tahun 2024 merupakan target akumulatif, dengan target akhir yaitu 113 modul aplikasi terintegrasi (100%). Pada triwulan II, sudah terealisasi 88,50 atau sejumlah 100 aplikasi akumulatif (54 aplikasi di tahun 2020-2021, 29 aplikasi di tahun 2022, 15 aplikasi di tahun 2023, dan 2 aplikasi pada triwulan I tahun 2024). Upaya pencapaian target integasi sistem akan terus dilanjutkan sesuai dengan perencanaan, dengan mengupayakan peningkatan koordinasi internal maupun eksternal secara masif serta monitoring dan evaluasi sistem sehingga capaian target tahun 2024 diharapkan tercapai.

Realisasi persentase sistem informasi pengawasan obat dan makanan terintegrasi dan *realtime* triwulan II Tahun 2024 belum mencapai target Tahun 2024 dengan kriteria **Akan Tercapai**. Namun demikian capaian per bulan sudah mencapai target yang telah ditentukan.

#### **4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pada indikator ini dapat dicapai melalui:

- a. Komitmen pimpinan organisasi sesuai dengan perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan;

Komitmen pemimpin memberikan efek positif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perencanaan dan realisasi kinerja capaian Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time. Komitmen dalam kepemimpinan menciptakan pondasi kuat bagi budaya kerja yang positif, memotivasi anggota tim, dan membawa perubahan yang berkelanjutan untuk melakukan integrasi tanpa membuat sistem informasi baru. Dukungan pimpinan dalam integrasi akan menentukan peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan penganggaran terkait sistem informasi terintegrasi sehingga dapat terealisasi sesuai target.

- b. Koordinasi antar unit dan lintas sektor secara berkesinambungan agar integrasi dapat terwujud;

Dalam implementasi integrasi sistem informasi dilaksanakan koordinasi dan kerjasama yang berkesinambungan agar semua kebutuhan dapat diidentifikasi dan dipersiapkan secara baik dan matang serta dapat diidentifikasi hambatan yang mungkin terjadi dan menyiapkan segala alternatif. Dengan persiapan yang baik diharapkan integrasi sistem dapat diimplementasi dengan efektif, efisien, cepat sehingga dapat memberikan manfaat maksimal serta output sesuai kebutuhan bagi masyarakat maupun pemerintah

- c. Perancangan/perencanaan pelaksanaan kegiatan secara detail dan jelas;

Dalam proses integrasi, perencanaan dilaksanakan dengan 4 (empat) kegiatan meliputi pertama, penetapan target atau tujuan. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif untuk mendukung program integrasi. Kedua, perumusan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini dari pada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Ketiga, identifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu dengan diketahui faktor-faktor lingkungan intren dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walau pun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu

mendatang adalah dilaksanakan yang menjadi bagian esensi dari proses perencanaan. Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan, Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada guna mewujudkan integrasi sistem yang realtime dan mendukung SPBE.

- d. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap aplikasi yang sudah dilakukan integrasi.

Monitoring dan Evaluasi merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program. Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak, sedangkan evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala per triwulan baik dengan pihak eksternal maupun internal agar kebermanfaatannya serta perbaikan agar integrasi sistem dapat dilaksanakan mendukung integrated governance serta dengan data yang terintegrasi maka akan mempermudah pimpinan dalam pengambilan keputusan.

#### 5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- a. Melakukan pendampingan dalam proses integrasi sistem informasi.

Pendampingan akan dilakukan oleh staf Pusdatin guna mempercepat implementasi integrasi sistem informasi serta juga melakukan sharing knowledge kepada unit agar aware dengan persiapan dan pelaksanaan integrasi sistem guna mendukung perwujudan visi misi BPOM

- b. Melakukan Koordinasi secara intensif dengan Unit/Kementerian/Lembaga.

Hal ini dilaksanakan guna percepatan integrasi, melalui koordinasi dengan pihak terkait langsung yang membangun sistem informasi maka elemen data dan kebutuhan integrasi dapat dilaksanakan dengan lancar

#### 6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sistem informasi pengawasan obat dan makanan terintegrasi dan realtime	14.544.041.000	4.507.323.033	30,99	97,35%	75% (tidak efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **tidak efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran belum seimbang dengan realisasi indikator kinerja, perlu dilakukan percepatan realisasi anggaran agar realisasi capaian kinerja tetap sesuai dengan target.

#### 7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	-	-	-
Rekomendasi Perbaikan	1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi OSS RBA 2. Melaksanakan koordinasi bersama kementerian Investasi dan unit pelayanan publik terkait piloting aplikasi layanan Publik yang akan beralih menjadi skema hak akses sesuai kesepakatan antara unit teknis BPOM dan Kementerian Investasi		

Keterangan	April	Mei	Juni
Rencana Aksi	Menyusun perencanaan target integrasi sistem informasi	Menyusun perencanaan target integrasi sistem informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan koordinasi bersama kementerian Investasi dan unit pelayanan publik terkait implementasi OSS ke depan serta integrasi sistem ke depan</li> <li>Merencanakan pertemuan monitoring dan evaluasi maksimal per triwulan</li> </ol>
Kondisi sebelum Rencana Aksi	Secara kegiatan, kegiatan berjalan lancar	Secara kegiatan, kegiatan berjalan lancar dan sesuai target yang ditetapkan.	<p>Secara kegiatan, kegiatan berjalan lancar dan sesuai target yang ditetapkan. tapi belum merealisasikan kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan koordinasi dengan Kementerian Investasi dan unit kerja</li> <li>Monitoring dan evaluasi OSS RBA belum dilaksanakan</li> </ol>
Kondisi Setelah Rencana Aksi	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya rencana /target capaian integrasi sistem informasi TA 2024</li> <li>Realisasi capaian tercapai sesuai yang ditetapkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terdapat penambahan 1 perizinan berusaha pada PB-UMKU Hasil Pra Registrasi Obat untuk mendukung kegiatan usaha /pbumku dengan <b>status uji coba</b></li> <li>Telah dilaksanakan pertemuan koordinasi pada 14 Juni 2024 dengan mengundang Kementerian Investasi serta unit kerja untuk membahas Implementasi sistem OSS RBA ke depan serta Monitoring dan evaluasi OSS</li> </ol>
Timeline	Akhir April 2024	Akhir Mei 2024	Akhir Juni 2024
Status	<b>CLOSE</b>	<b>CLOSE</b>	<b>CLOSE</b>

#### 8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja diantaranya:

- Bukti Keterpenuhan Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi dan real time didukung oleh aktivitas prioritas dalam pemenuhan Satu Data BPOM;
- Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja; dan
- Pergeseran penganggaran pengembangan aplikasi diarahkan kepada Rearsitektur Big Data sebagai wujud pemenuhan Satu Data BPOM.
- Pencatatan rekomendasi perbaikan indikator untuk hadir lebih baik ke depannya.

## SASARAN KEGIATAN 5 Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal

### Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan *Roadmap* TIK

#### 1. Perbandingan target dan realisasi triwulan II Tahun 2024

BULAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Januari	0%	0%	100%	Baik	Efektif
Februari	0%	4%	120%	Sangat Baik	Efektif
Maret	10%	19,8%	198%	Tidak Dapat Disimpulkan	
April	35%	36,76%	105,02%	Sangat Baik	Efektif
Mei	35%	40%	114,28%	Sangat Baik	Efektif
Juni	50%	51,80%	103,6%	Sangat Baik	Efektif

Sampai triwulan II indikator persentase pemenuhan infrastruktur TIK sesuai dengan roadmap TIK telah merealisasikan 46 (empat puluh enam) pengadaan infrastruktur termin II yaitu:

- 1) Langganan Koneksi Internet Utama – Termin I;
- 2) Layanan Koneksi Internet (*high availability*) – Termin I;
- 3) Sewa Wifi Manage Service – Termin I;
- 4) Pemeliharaan perangkat server fisik di DC BPOM – Termin I;
- 5) Pemeliharaan perangkat jaringan BPOM – Termin I;
- 6) Pemeliharaan paket kabel LAN/UTP dan FO BPOM – Termin I;
- 7) Pemeliharaan PC/Notebook – Termin I;
- 8) Pemeliharaan Suku cadang Januari – Februari;
- 9) Pemeliharaan UPS – Termin I;
- 10) Pemeliharaan Printer – Termin I;
- 11) Keamanan jaringan BPOM – Termin I;
- 12) Sewa access switch (1 unit) – Termin I;
- 13) Sewa notebook (20 unit) – Termin I;
- 14) Sewa Desktop PC Dit.KMEI (1 unit) – Termin I;
- 15) Sewa wifi manage service – Termin I;
- 16) Sewa desktop PC Dit.Reg OT (18 Unit) – Termin I;
- 17) Lisensi Ms, Office;
- 18) Perangkat firewall;
- 19) Lisensi zoom meeting Januari – Februari;
- 20) Lisensi add on large zoom meeting Januari – Februari;
- 21) Lisensi Ms Office tahap 2;
- 22) Renewal Antispam;
- 23) Pengadaan Kamera;
- 24) Pengadaan Kabel;
- 25) Pemeliharaan Suku Cadang April;
- 26) Lisensi Zoom Meting Maret- April;
- 27) Lisensi Add On Large Zoom Meeting Mar-April;
- 28) Langganan Koneksi Internet Utama Termin II;
- 29) Layanan Koneksi Internet (High Availability) Termin II;
- 30) Sewa Wifi Manage Service Termin II;
- 31) Pemeliharaan Perangkat Server Fisik di DC BPOM Termin II;

- 32) Pemeliharaan Perangkat Jaringan BPOM Termin II;
- 33) Pengadaan Perangkat Audio;
- 34) Lisensi Zoom Meeting;
- 35) Lisensi Add on Large Zoom Meeting;
- 36) Pemeliharaan Suku Cadang Bulan Mei dan Juni 2024;
- 37) Pemeliharaan Paket Kabel LAN/ UTP dan FO BPOM Termin II;
- 38) Pemeliharaan PC/ Notebook Termin II;
- 39) Pemeliharaan UPS Termin II;
- 40) Pemeliharaan Printer Termin II;
- 41) Keamanan Jaringan BPOM Termin II;
- 42) Sewa Access Switch (1 Unit) Termin II;
- 43) Sewa Notebook (20 unit) Termin II;
- 44) Sewa Desktop PC Dit. KMEI (1 unit) Termin II;
- 45) Sewa wifi manage service Termin III; dan
- 46) Sewa Desktop PC Dit. Reg OT (18 unit) Termin II


Dengan demikian, capaian persentase pemenuhan infrastruktur TIK sesuai dengan roadmap TIK pada triwulan II tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 103,6% dengan kriteria SANGAT BAIK.

**2. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2024 dengan triwulan sebelumnya**

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Realisasi TW II	% Capaian TW II
Persentase pemenuhan infrastruktur TIK sesuai dengan roadmap TIK	19,8%	19,8%	51,80%	51,80%

Terdapat peningkatan capaian kinerja pada triwulan II dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I. Dimana triwulan I capaian kinerjanya hanya 19,8% dibandingkan dengan target tahunan, sedangkan pada triwulan II capaian kinerjanya sebesar 51,80% dari target tahunan yang telah ditentukan sebesar 100%.

**3. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II Tahun 2024 dengan target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target TW II	Target Tahunan	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria Terhadap Target tahunan
Persentase pemenuhan infrastruktur TIK sesuai dengan roadmap TIK	50%	100%	51,80%	51,80%	 Perlu Upaya Keras

Realisasi persentase pemenuhan infrastruktur TIK sesuai dengan roadmap TIK triwulan II Tahun 2024 belum mencapai target Tahun 2024 dengan kriteria **Perlu Upaya Keras**. Namun demikian capaian per bulan sudah mencapai target yang telah ditentukan.

**4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pada triwulan II tahun 2024, Pusdatin telah berupaya untuk meningkatkan kinerja indikator ini, adapun tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada indikator ini yaitu:

- a. Pusdatin telah membuat monitoring dan evaluasi terhadap layanan koneksi internet yang dibuatkan secara berkala;
- b. Pusdatin telah melakukan pemisahan jaringan LAN dan WiFi yang digunakan di lingkungan BPOM untuk optimalisasi layanan koneksi internet;

- c. Pusdatin telah melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya melalui ITSM terkait permohonan jaringan dan internet, lisensi *microsoft office*, windows dan lainnya terkait dengan infrastruktur TIK; dan
- d. Pusdatin telah berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan revisi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur TIK, serta permohonan tambahan anggaran untuk Lisensi Adobe, namun belum dapat difasilitasi dan pemenuhan kebutuhan lisensi Adobe dikembalikan ke masing-masing satker yang membutuhkan;
- e. Pusdatin secara berkelanjutan melakukan pemeliharaan perangkat jaringan di lingkungan BPOM dan khususnya ruang jaringan BPOM dengan seluruh perangkat pendukungnya;
- f. Penyediaan jaringan LAN untuk setiap pegawai yang mendukung terwujudnya No One Left Behind;
- g. Pusdatin melakukan monitoring terhadap kebutuhan penyediaan APD bagi unit kerja yang membutuhkan. Sewa APD dilakukan berdasarkan permintaan sebelum tahun anggaran berjalan dengan analisa kebutuhan dan alokasi anggaran tersedia.

#### 5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Analisis program kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap layanan jaringan internet yang dilakukan setiap bulannya  
Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap laporan yang disampaikan oleh engineering on site (EoS) setiap bulan kemudian dibandingkan terhadap *Service Level Agreement* (SLA) yang terdapat pada waktu awal berkontrak.
- b. Melakukan manage jaringan LAN dan wifi di lingkungan BPOM.
- c. Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan revisi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur TIK, serta permohonan tambahan anggaran untuk Lisensi Adobe.
- d. Melakukan pemeliharaan perangkat jaringan di lingkungan BPOM dan ruang khusus jaringan BPOM serta seluruh perangkat pendukungnya.
- e. Melakukan penyediaan jaringan LAN untuk setiap pegawai sesuai ketentuan.
- f. Melakukan analisa kebutuhan APD sesuai permintaan unit kerja dan alokasi anggaran terkait.

#### 6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase pemenuhan infrastruktur TIK sesuai dengan roadmap TIK	886.498.000	881.564.145	99,44%	51,80%	75% (tidak efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **belum efisien** karena capaian indikator masih lebih rendah daripada % realisasi anggaran. Hal ini disebabkan proses pengadaan yang telah dilaksanakan 17 (tujuh belas) diantaranya dilakukan pembayaran dan laporan kegiatan secara termin sesuai kontrak yang telah dilaporkan. Oleh karena itu menimbulkan kesimpulan tidak efisien antara realisasi anggaran dan capaian indikator yang telah terlaksana. Diantara kegiatan pemenuhan infrastruktur TIK yang dilakukan secara termin tersebut akan akan mencapai 100% pada akhir tahun 2024.

## 7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
<b>Kendala/ Permasalahan</b>	Pada triwulan I, capaian indikator pemenuhan infrastruktur TIK sesuai dengan roadmap TIK melebihi 100% dari target, hal ini dikarenakan kesalahan dalam menetapkan target setiap bulan. Telah dilakukan reviu target capaian indikator dan hasilnya telah dikoordinasikan.		
<b>Rekomendasi Perbaikan</b>	1. Monev pemenuhan infrastruktur TIK secara berkala melalui ITSM; dan 2. Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait kebutuhan revisi anggaran jika diperlukan.		
<b>Rencana Aksi</b>	1. Melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan infrastruktur TIK secara berkala melalui ITSM; dan 2. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait dengan kebutuhan lisensi untuk pegawai di lingkungan Badan POM		
<b>Kondisi sebelum Rencana Aksi</b>	-	-	Pemenuhan infrastruktur TIK khususnya terkait lisensi belum dapat terpenuhi
<b>Kondisi Setelah Rencana Aksi</b>	-	-	Berdasarkan hasil diskusi rapat dengan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk Pemenuhan infrastruktur TIK (lisensi) yang tidak dapat dipenuhi Pusdatin, alokasi anggaran dapat dilakukan oleh masing-masing satker sesuai kebutuhannya.
<b>Timeline</b>	Setiap Bulan	Setiap Bulan	Setiap Bulan
<b>Status</b>	Close	Close	Close

## 8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja diantaranya:

- a. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya terhadap permintaan dari unit maka kebutuhan infrastruktur TIK di lingkungan BPOM terpenuhi
- b. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja.

## **SASARAN KEGIATAN 6**

### **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal**

#### **Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan**

##### **1. Perbandingan target dan realisasi triwulan II Tahun 2024**

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB) di Pusdatin pada triwulan II tahun 2024 belum diperoleh menunggu hasil penilaian dari TPI (Tim Penilai Internal) atau APIP pada akhir tahun 2024.

##### **2. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2024 dengan triwulan sebelumnya**

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2024 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

##### **3. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II Tahun 2024 dengan target Tahun 2024**

Efisiensi anggaran pada triwulan II Tahun 2024 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator. Indikator ini didukung oleh 3 (tiga) komponen kegiatan yaitu Penguatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Kinerja Individu dan Unit Kerja Pusdatin serta Peningkatan Manajemen Perubahan Pusdatin. Pada bulan Juni mengalami perubahan anggaran yang semula Rp.746.132.000,-- menjadi Rp.895.440.000,--, perubahan ini disebabkan oleh adanya penambahan anggaran pada tata kelola kinerja individu dan unit kerja pusdatin untuk dapat memenuhi kebutuhan sosialisasi, sehingga menambah wawasan dan pengetahuan pegawai terhadap update peraturan terbaru demi memaksimalkan kinerja Pusdatin. Hingga bulan Juni realisasi anggaran pada indikator ini adalah Rp.520.984.090,--

##### **4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pusdatin tahun 2023 telah melaksanakan perbaikan Reformasi Birokrasi yang hasilnya sudah diterima di TW4 2023 dengan hasil meningkat dari tahun sebelumnya. Penyebab kegagalan di tahun sebelumnya adalah kurangnya pemahaman dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan dalam koridor Reformasi Birokrasi. Ditahun 2023 Pusdatin melakukan perbaikan dengan dimulai dari pimpinan Reformasi Birokrasi oleh pimpinan tertinggi di Pusdatin yang sudah dilakukan sejak Triwulan I yang sudah disampaikan pada laporan terdahulu, kegiatan atau program-program perbaikan yang dilakukan di Triwulan II sebagai berikut:

Dalam upaya perbaikan terus menerus implementasi Pusdatin telah menyusun juga rencana aksi kerja perlu diimplementasikan dan dimonitor setiap triwulan II.

Pada Triwulan II ini monitor pelaksanaan rencana aksi sebagai berikut:

- a. Implementasi pedoman mekanisme dan kriteria pembentukan Tim pelaksana R
- b. Implementasi hasil tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi ZI tahun 2023, dengan sudah terlaksananya SK Reward dan Punishment
- c. Perbaikan penyajian data dukung LKE yang lebih efektif dan efisien

**5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Faktor yang menjadi penunjang keberhasilan dalam pembangunan Zona Integritas menuju dalam WBK dan WBBM adalah pemahaman yang baik bagi segenap unsur pelaksana kegiatan dan Pusdatin dengan komitmen pimpinan sebagai role model dan komitmen seluruh pelaksana kegiatan. Sosialisasi seluruh unsur Reformasi Birokrasi sebagai pedoman dalam membangun Zona Integritas yang berkelanjutan akan menghasilkan pemahaman yang baik dan membangun komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Pusdatin.

**6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Efisiensi anggaran pada triwulan II tahun 2024 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator. Tidak ada revisi anggaran pada RO yang ditagging untuk pencapaian indikator Indeks RB Pusdatin.

**7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

Keterangan	April	Mei	Juni
<b>Kendala/ Permasalahan</b>	Kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan belum terdapat bukti penerapan secara rutin/berkala dan kegiatan prioritas belum menyeluruh pada setiap aspek fungsi di Pusdatin		
<b>Rekomendasi Perbaikan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terdapat penetapan target prioritas pada seluruh area perubahan kecuali pada area Manajemen Perubahan</li> <li>2. Telah memiliki kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan namun belum terdapat bukti penerapan secara rutin/berkala;</li> <li>3. Hasil capaian/monitoring perjanjian kinerja belum seluruhnya menjadi dasar/unsur untuk pemberian reward and punishment;</li> <li>4. Belum menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit BPK sesuai saran</li> </ol>	-	-
<b>Rencana Aksi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengusulkan kegiatan prioritas pusdatin ke Pusakom</li> <li>2. Menyusun renaksi yang menetapkan kegiatan prioritas semua fungsi melibatkan seluruh kelompok kerja perubahan RB</li> <li>3. Menyusun strategi penerapan reward dan punishment sesuai SK yang ditetapkan pada bulan Februari 2024</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun strategi implementasi reward dan punishment berdasarkan penilaian kinerja</li> <li>2. Implementasi reward dan punishment dengan memberikan penghargaan <i>employee of the month</i></li> </ol>	Menyusun data dukung yang lebih tepat sasaran sesuai dengan temuan BPK sebagai bukti menindaklanjuti temuan BPK
<b>Kondisi sebelum Rencana Aksi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan prioritas tidak dicantumkan ke rencana kerja Pusdatin untuk dimonitor secara berkala dan menyeluruh dari seluruh area perubahan</li> <li>2. memiliki kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi</li> </ol>	Belum ada kesepakatan dalam penerapan implementasi reward dan punishment dengan memberikan penghargaan	Data dukung belum dapat membuktikan bahwa Pusdatin telah menindaklanjuti temuan BPK

	petugas pemberi pelayanan namun belum terdapat bukti penerapan secara rutin/berkala		
<b>Kondisi Setelah Rencana Aksi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>kegiatan prioritas telah ditetapkan dan masuk ke dalam matriks monitoring diseluruh area perubahan</li> <li>Penerapkan nilai SKP berdampak pada punishment seluruh karyawan Pusdatin</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemotongan tunjangan kinerja berdasarkan nilai SKP individu sebagai reward dan punishment kinerja</li> <li>penetapan <i>employee of the month</i> sebagai reward bekinerja baik yang kemudian akan diusulkan sebagai pegawai teladan BPOM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Data dukung disimpan dalam suatu tempat yang dapat diakses oleh inspektorat</li> <li>Beberapa kasus sudah berstatus Sesuai Saran dan Close</li> </ol>
<b>Timeline</b>	Triwulan II	Triwulan II	Triwulan II
<b>Status</b>	Close	Close	Close

#### 8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, diperoleh informasi bahwa realisasi IKU Tahun 2023 telah tercapai dengan capaian 103,15%. Namun demikian masih memerlukan peningkatan yang cukup signifikan dikarenakan adanya perubahan cara penilaian, dimana terdapat RB Tematik dan RB General.

### Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

#### 1. Perbandingan target dan realisasi triwulan II Tahun 2024

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun dan dilakukan oleh APIP/Inspektorat.

#### 2. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2024 dengan triwulan sebelumnya

Pada triwulan II Tahun 2024 belum diperoleh hasil pengukuran Nilai AKIP yang dilaksanakan oleh APIP/Inspektorat, sehingga tidak dapat dibandingkan hasilnya. Hasil Nilai AKIP baru dapat diperoleh pada bulan Desember 2024, dikarenakan assessment penilaian dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2024.

#### 3. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II Tahun 2024 dengan target Tahun 2024

Capaian realisasi Nilai AKIP didapat pada akhir tahun, sehingga pada triwulan II Tahun 2024 belum didapatkan hasil pengukuran Nilai AKIP.

#### 4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2023, Pusdatin telah berhasil menaikkan nilai AKIP menjadi 83,80 (A), namun demikian perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai tersebut karena target 2024 juga meningkat. Rekomendasi penilaian AKIP di tahun 2023 antara lain:

- Memperbaharui SK IKU selaras dengan dokumen Reviu Renstra ataupun Evaluasi Paruh Waktu Renstra, serta memastikan bahwa IKU yang telah disahkan seluruhnya telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja yang ditanda tangani Kepala PUSDATIN;
- Melakukan analisa mendalam terhadap segala isu strategis yang telah disajikan pada dokumen rencana strategis guna menghasilkan hasil analisis yang komprehensif, serta dapat berdampak positif terhadap proses penetapan perencanaan kinerja untuk *progress* capaian kinerja yang lebih baik.

- c. Menyusun manual IKU / Kertas Kerja IKU secara komprehensif untuk setiap indikator kinerja utama, dan selaras dengan dokumen perencanaan (Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Paruh Waktu Renstra);
- d. Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja pada rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal.
- e. Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional dan level internasional.
- f. Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan data perhitungan capaian secara akurat, mengacu pada *breakdown* target per triwulan pada RAPK.
- g. Memaksimalkan pemanfaatan proses evaluasi internal triwulanan dalam rangka pemantauan pencapaian kinerja secara berkala untuk meningkatkan capaian kinerja *output* dan *outcome*;
- h. Meningkatkan pencapaian target kinerja unit dan memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi internal untuk mengantisipasi potensi target kinerja yang tidak tercapai dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi dari APIP, pada triwulan II tahun 2024, telah dilakukan:

- a. Perbaikan pada SK IKU Pusdatin dimana seluruh IKU yang telah disahkan pada dokumen SK IKU, telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja;
- b. Pimpinan Unit Kerja sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) telah terlibat dan berperan aktif dalam mengukur capaian kinerja pada rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal, hal ini telah didokumentasikan pada Laporan Evaluasi Internal Triwulan I dan II 2024;
- c. Laporan Evaluasi Internal Triwulan I dan II 2024 telah menyajikan data capaian kinerja per bulan mengacu pada *breakdown* target pada RAPK;
- d. Terdapat peningkatan kinerja dari tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 dibuktikan dengan kenaikan NPS dan penambahan jumlah IKU yang mencapai target; dan
- e. Pada triwulan I tahun 2024 juga telah disusun Laporan Kinerja Tahun 2023.

#### **5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai AKIP antara lain dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua capaian IKU, kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti serta realisasi anggaran pada satker Pusdatin, tim SAKIP mengikuti bimtek SAKIP dan monev online, dan mengikuti rapat kerja nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan selalu ditingkatkannya kompetensi tim SAKIP setiap tahun, diharapkan perbaikan dapat selalu dilakukan untuk pelaksanaan sistem AKIP yang lebih baik.

#### **6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Efisiensi anggaran pada triwulan II Tahun 2024 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator. Indikator ini didukung oleh 2 (dua) komponen kegiatan yaitu Perkuatan implementasi SAKIP Tahun 2024 dan Penyusunan Renstra TA 2025-2029 dan Pelaporan Kegiatan. Pada bulan Juni mengalami perubahan anggaran yang semula Rp.894.913.000,-- menjadi Rp.685.172.000,--, perubahan ini disebabkan oleh adanya optimalisasi anggaran, sehingga dilakukan relokasi/revisi anggaran ke kegiatan Pusdatin lainnya yang memiliki tingkat urgensi lebih tinggi. Hingga bulan Juni realisasi anggaran pada indikator ini adalah Rp.317.473.000,--

## 7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	-	-	-
Rekomendasi Perbaikan	-	-	-
Rencana Aksi	-	-	-
Kondisi sebelum Rencana Aksi	-	-	-
Kondisi Setelah Rencana Aksi	-	-	-
Timeline	-	-	-
Status	-	-	-

## 8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, diperoleh informasi bahwa target tahun 2023 belum tercapai, namun sudah ada peningkatan realisasi dari tahun 2022 serta telah menempati peringkat ke 4 (empat) dari seluruh Satker dan UPT di Badan POM. Telah dilakukan tindak lanjut berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi sakin tahun 2023 pada triwulan I tahun 2024 sehingga diharapkan target tahun 2024 dapat tercapai.

### Nilai Pengelolaan Kearsipan

#### 1. Perbandingan target dan realisasi triwulan II Tahun 2024

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun dan dilakukan oleh Biro Umum.

#### 2. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2024 dengan triwulan sebelumnya

Pada triwulan II Tahun 2024 belum diperoleh hasil pengukuran Nilai Pengelolaan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Biro Umum, sehingga tidak dapat dibandingkan hasilnya. Hasil Nilai Pengelolaan Kearsipan baru dapat diperoleh pada bulan Desember 2024, dikarenakan keseluruhan assessment penilaian baru selesai dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2024.

#### 3. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II Tahun 2024 dengan target Tahun 2024

Capaian realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan didapat pada akhir tahun, sehingga pada triwulan II Tahun 2024 belum didapatkan hasil pengukuran Nilai Pengelolaan Kearsipan.

#### 4. Analisis penyebab penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- Adanya SDM Arsiparis yang belum memiliki sertifikasi kearsipan
- Pada tahun 2023 Pusdatin belum melakukan pelaporan daftar arsip aktif kepada Biro Umum selaku Unit kearsipan BPOM.
- Belum optimalnya penerapan TND di PUSDATIN
- Masih adanya arsip inaktif yang belum diserahkan ke Biro Umum

#### 5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Sosialisasi secara berkala terkait Implementasi Peraturan BPOM No 6 Tahun 2022 kepada seluruh pegawai PUSDATIN untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh pegawai terkait pentingnya kesesuaian format surat dengan TND atau Peraturan BPOM No 6 Tahun 2022.

- b. Adanya penyesuaian proses alur surat keluar, dimana untuk seluruh draft surat keluar dilingkungan PUSDATIN akan melalui proses koreksi format terlebih dahulu oleh arsiparis, sebelum surat tersebut diinputkan melalui aplikasi SRIKANDI/SIKD untuk memastikan kesesuaian format surat dengan TND.
- c. SDM arsiparis PUSDATIN yang belum memiliki sertifikasi kearsipan, akan mengikuti sertifikasi kearsipan Dinamis pada TW III 2024.
- d. Telah dilakukan pemberkasan terhadap arsip elektronik 2023 pada aplikasi SRIKANDI.

#### 6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi anggaran pada triwulan II Tahun 2024 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator. Indikator ini didukung oleh 1 (satu) komponen kegiatan yaitu Nilai Pengelolaan Kearsipan. Hingga bulan Juni realisasi anggaran pada indikator ini adalah Rp.10.159.000,-- dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan berupa pembelian rak arsip dan folder arsip untuk mendukung proses penataan arsip di PUSDATIN agar sesuai dengan standar penataan arsip yang telah ditetapkan.

#### 7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
<b>Kendala/ Permasalahan</b>	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih adanya arsiparis yang belum memiliki sertifikasi kearsipan.</li> <li>2. Masih adanya Arsip Inaktif yang belum diserahkan ke Unit Kearsipan</li> <li>3. Masih minimnya volume arsip aktif yang dilaporkan.</li> <li>4. Belum Optimalnya penerapan TND dalam kegiatan persuratan di Unit Kerja PUSDATIN</li> </ol>
<b>Rekomendasi Perbaikan</b>	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikuti Sertifikasi kearsipan bagi SDM arsiparis yang belum tersertifikasi</li> <li>2. Melakukan penyerahan arsip Inaktif ke Biro Umum</li> <li>3. Menambah volume arsip aktif yang diserahkan ke Biro Umum.</li> </ol>
<b>Rencana Aksi</b>	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikuti Sertifikasi kearsipan arsip dinamis bagi SDM arsiparis yang belum tersertifikasi pada TW III 2024.</li> <li>2. Melakukan penyerahan arsip Inaktif PUSDATIN ke Biro Umum selaku Unit Kearsipan Biro Umum.</li> <li>3. Melakukan pelaporan arsip aktif secara rutin kepada Biro Umum selaku Unit Kearsipan BPOM.</li> <li>4. Melakukan Sosialisasi TND secara berkala kepada seluruh pegawai PUSDATIN, disertai perubahan alur surat keluar sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses penarikan nomor surat tidak lagi dilakukan oleh masing-masing pegawai melainkan satu pintu melalui arsiparis.</li> <li>- Menambah alur "filter/koreksi surat oleh arsiparis" untuk memastikan sebelum surat diinput kedalam aplikasi SRIKANDI/SIKD surat tersebut telah sesuai dengan TND.</li> </ul> </li> </ol>
<b>Kondisi sebelum Rencana Aksi</b>	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih dijumpai beberapa surat yang belum sesuai dengan TND.</li> <li>2. Terdapat SDM arsiparis yang belum tersertifikasi.</li> <li>3. Jumlah arsip aktif yang diserahkan belum optimal.</li> <li>4. Masih adanya arsip inaktif yang belum diserahkan oleh PUSDATIN ke Biro Umum</li> </ol>
<b>Kondisi Setelah Rencana Aksi</b>	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alur "filter/koreksi format oleh arsiparis" telah diterapkan, sehingga jumlah ketidaksesuaian surat keluar dengan format TND di lingkungan PUSDATIN sudah dapat minimalisir.</li> </ol>

Keterangan	April	Mei	Juni
			2. Pada tanggal 30 Juli - 2 Agustus 2024 Arsiparis PUSDATIN akan mengikuti ujian sertifikasi kearsipan. 3. Telah dilakukan pemberkasan terhadap arsip elektronik SRIKANDI tahun 2023 sebagai bagian dari pengelolaan arsip aktif untuk mengoptimalkan proses pelaporan arsip aktif ke Biro Umum. 4. Telah terlaksana audit kearsipan serta Desk hasil audit sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kearsipan di PUSDATIN selama 2023. 5. Sedang berlangsung proses perapihan arsip inaktif untuk mempercepat pelaksanaan penyerahan arsip inaktif ke Biro Umum.
<b>Timeline</b>	-	-	Akhir Tahun
<b>Status</b>	-	-	Belum close

#### 8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pada laporan kinerja tahun 2023, belum terdapat IKU Nilai Pengelolaan Kearsipan dikarenakan Nilai Pengelolaan Kearsipan baru masuk ke IKU Pusdatin pada tahun 2024. Namun pada tahun 2023 sudah dilakukan penilaian pengelolaan kearsipan dan hasilnya menurun dari tahun 2022, sehingga perlu upaya peningkatan berupa peningkatan kualitas SDM kearsipan melalui sertifikasi PAD (Pengelolaan Arsip Dinamis) bagi SDM arsiparis yang belum tersertifikasi, selain dari sisi SDM, perbaikan Nilai kearsipan juga akan terus dilakukan secara konsisten salah satunya melalui komitmen untuk melakukan pelaporan daftar arsip aktif tahun berjalan secara rutin setiap semester kepada Biro Umum selaku unit kearsipan, sejalan dengan pelaporan arsip aktif untuk mengefisienkan ruang penyimpanan serta dalam rangka pengendalian volume arsip, pelaporan daftar arsip inaktif juga akan dilaksanakan secara berkala didasarkan dan disesuaikan dengan JRA (Jadwal Retensi Arsip) sebagai dasar penyeleksiannya.

## SASARAN KEGIATAN 7

### Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi yang Berkinerja Optimal

#### Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi

**1. Perbandingan target dan realisasi triwulan II Tahun 2024**

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun dan dilakukan oleh Biro SDM.

**2. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2024 dengan triwulan sebelumnya**

Pada triwulan II Tahun 2024 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dilaksanakan oleh Biro SDM, sehingga tidak dapat dibandingkan hasilnya. Hasil Indeks Profesionalitas ASN baru dapat diperoleh pada bulan Desember 2024, dikarenakan assessment penilaian dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2024.

**3. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II Tahun 2024 dengan target Tahun 2024**

Capaian realisasi Indeks Profesionalitas ASN didapat pada akhir tahun, sehingga pada triwulan II Tahun 2024 belum didapatkan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

**4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Kualifikasi pendidikan pegawai (bobot 25%), kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis (bobot 40%), kinerja (bobot 30%), dan disiplin (bobot 5%) mempengaruhi nilai indeks profesionalitas ASN. Rencana Aksi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator antara lain: pelaporan disiplin pegawai yang tidak mengikuti apel 3 (tiga) kali berturut turut, pemanggilan pegawai yang melakukan pelanggaran kedisiplinan kehadiran jam kerja tanpa alasan yang sah (alpa), terlambat masuk kerja, dan pulang sebelum waktunya dari ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan (diakomodir dengan aplikasi SIMOD di aplikasi SIASN), dan penilaian SKP setiap triwulan. Target peningkatan kompetensi pada akhir tahun untuk seluruh pegawai sebanyak 20 JP harus dicapai oleh masing masing pegawai dengan cara melakukan pengembangan kompetensi yang berupa program diklat/bimtek/sosialisasi/seminar yang diselenggarakan oleh PPSDM.

Usaha yang dilakukan untuk menegakkan disiplin pegawai antara lain melakukan apel dan internalisasi via online zoom setiap Senin untuk mensosialisasikan informasi penting kepada seluruh pegawai. Diseminasi mengenai Gratifikasi, *Whistle Blowing System* dan Benturan Kepentingan dengan sosial media milik Pusdatin yang semakin ditingkatkan. Untuk mendorong kinerja pegawai, akan dilaksanakan penerapan reward dan punishment yang sedang dibahas oleh Agend of Change (AoC) dan Tim yang ditunjuk, *Employee Of The Month* (EOTM) dengan tujuan untuk pegawai yang berkinerja terbaik dan berdisiplin tinggi diberi penghargaan. Pada Triwulan II Tahun 2024 diperoleh 1 (satu) orang pegawai dengan nilai SKP "Cukup", hal ini dapat mengurangi perolehan bobot kinerja. Oleh karena itu, para pegawai didorong agar dapat memaksimalkan pengembangan kompetensinya.

**5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

No	Nama Kegiatan	Bulan	Peserta	Keterangan
1.	Workshop Service Excellent	Januari 2024	Seluruh Pegawai Pusdatin	Pengembangan Kompetensi Pelayanan Prima
2.	Internalisasi Tata Naskah Dinas Terbaru	Februari 2024	Seluruh Pegawai Pusdatin	Pengembangan Kompetensi Administrasi

No	Nama Kegiatan	Bulan	Peserta	Keterangan
3.	Outbond Team Building	Maret 2024	Seluruh Pegawai Pusdatin	Pengembangan Kompetensi Kerjasama
4.	Sosialisasi Gratifikasi, Whistle Blowing System, dan Benturan Kepentingan	April 2024	Seluruh Pegawai Pusdatin	Pengembangan Kompetensi Pelayanan Prima
5.	Pelatihan Manajemen Risiko Keamanan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Publik BSSN Tahun Anggaran 2024	Mei 2024	Pranata Komputer di Pusdatin	Pengembangan Kompetensi Teknis
6.	Internalisasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	Juni 2024	Seluruh Pegawai Pusdatin	Pengembangan Kompetensi Administrasi

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator di triwulan II tahun 2024 adalah Pengembangan Kompetensi Pegawai dalam bidang pelayanan, teknis, dan administrasi. Selain itu juga dilakukan kegiatan internalisasi secara rutin tiap bulan untuk mensosialisasikan semua komponen penilaian indeks seperti kompetensi, capaian JP, kinerja individu/SKP, disiplin pegawai, capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus dilakukan tindaklanjutnya.

#### 6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi anggaran pada triwulan II Tahun 2024 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator. Indikator ini didukung oleh 2 (dua) komponen kegiatan yaitu Pembinaan JF Komputer dan Peningkatan Kompetensi SDM TIK. Pada bulan Mei mengalami perubahan anggaran yang semula Rp.709.728.000,-- menjadi Rp.708.674.000,--, perubahan ini disebabkan oleh adanya optimalisasi anggaran, dengan melakukan revisi sisa anggaran Pembinaan JF Pranata Komputer ke kegiatan lainnya. Hingga bulan Juni realisasi anggaran pada indikator ini adalah Rp.498.619.241,--

#### 7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
<b>Kendala/Permasalahan</b>	Belum semua pegawai memprioritaskan pengembangan kompetensi diklat teknis di JFT nya masing masing	Penolakan Pencantuman Gelar untuk 1 (satu) pegawai Pusdatin yang sudah menempuh Strata 1 sebelum menjadi pegawai BPOM.	Adanya pembatasan kebijakan untuk menempuh strata 2 di Badan POM RI, yaitu umur pegawai yang mengajukan Strata 2 nya masih dibawah 40 tahun harus mencari beasiswa dari luar instansi/swasta
<b>Rekomendasi Perbaikan</b>	Himbauan agar pegawai memprioritaskan pengembangan kompetensi diklat teknis di JFT nya masing masing	Tindak Lanjut Koordinasi dengan Biro SDM mengenai alasan penolakan pencantuman gelar	Peserta Tugas Belajar Strata 2 sudah disetujui dan sedang dalam proses penentuan pendanaan beasiswa

<b>Keterangan</b>	<b>April</b>	<b>Mei</b>	<b>Juni</b>
<b>Rencana Aksi</b>	Pengumuman di grup telegram untuk tahun 2024 memprioritaskan pengembangan kompetensi diklat teknis JFT nya masing masing	Mempersiapkan untuk menghadapi ujian penyesuaian ijazah di periode selanjutnya	Melakukan pengawalan oleh Tim dari Pusdatin untuk pegawai yang akan melanjutkan studi ke Strata 2
<b>Kondisi sebelum Rencana Aksi</b>	Tahun 2023 beberapa pegawai dalam pengembangan kompetensinya belum belum maksimal di diklat teknis	Pegawai masih menempuh tugas belajar Strata 1 dari Badan POM RI.	Pegawai masih mencari penyedia beasiswa untuk menempuh tugas belajar Strata 2
<b>Kondisi Setelah Rencana Aksi</b>	Pengembangan kompetensi pegawai tahun 2024 diprioritaskan ke pengembangan kompetensi teknis untuk jabatan fungsionalnya	Pegawai masih menempuh tugas belajar Strata 1 dari Badan POM RI di program studi ekonomi.	Pegawai sudah menempuh ujian untuk memperoleh beasiswa Strata 2 dan sedang menunggu pengumuman kelulusan beasiswa.
<b>Timeline</b>	April 2024	Mei 2024	Juni 2024
<b>Status</b>	Sedang dalam proses pengembangan kompetensi teknis jabatna fungsionalnya	Close	Sedang menunggu pengumuman kelulusan beasiswa

#### 8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, diperoleh informasi bahwa target tahun 2023 telah tercapai dalam laporan kinerja tahun 2023. Target IP ASN Tahun 2024 adalah 89,63, dan untuk Triwulan II tahun 2024 belum dapat dilakukan pengukuran karena IP ASN tahun 2024 bisa diukur per akhir tahun 2024 (Triwulan IV Tahun 2024).

## SASARAN KEGIATAN 8

### Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi yang Terintegrasi dan Adaptif

#### Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal

#### 1. Perbandingan target dan realisasi triwulan II Tahun 2024

BULAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Januari	3	3	100%	Baik	Efektif
Februari	3	3	100%	Baik	Efektif
Maret	3	3	100%	Baik	Efektif
April	3	3	100%	Baik	Efektif
Mei	3	3	100%	Baik	Efektif
Juni	3	3	100%	Baik	Efektif

Indeks Pengelolaan data dan informasi yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi. Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu :

- a. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC  
Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan adalah verifikasi data pada dashboard BCC.
- b. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup *email* dan pemanfaatan *dashboard* BCC.


Dengan demikian, capaian indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal pada triwulan II tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dengan kriteria BAIK.

2. **Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2024 dengan triwulan sebelumnya**

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Realisasi TW II	% Capaian TW II
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	3	100%	3	100%

Tidak terdapat peningkatan capaian kinerja pada triwulan II dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I. Dimana triwulan I dan triwulan II capaian kerjanya mencapai 100% dari target tahunan yang telah ditentukan.

3. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan II Tahun 2024 dengan target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target TW II	Target Tahunan	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria Terhadap Target Tahunan
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	3	3	100%	100%	 Tercapai/Melampaui

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal triwulan II tahun 2024 sudah mencapai target Tahun 2024 dengan kriteria **Tercapai/Melampaui**. Realisasi nilai 3 merupakan nilai maksimal, sehingga tidak perlu dilakukan reuiu untuk menaikkan target, namun perlu upaya untuk mempertahankan capaian agar target renstra tahun 2024 tetap tercapai.

4. **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya kenaikan nilai indeks, antara lain:

- Tercapainya target Verifikasi Dashboard BCC didukung dengan metode pengingat rutin yang dilakukan di setiap awal bulan kepada PIC atau petugas verifikasi dashboard BCC;
- Adapun Pemanfaatan Dashboard BCC yang mencapai target disebabkan karena aktivitas Kepala Pusdatin yang secara rutin melakukan monitoring pada data-data yang tersedia di BCC, serta penggunaan email Badan POM oleh Unit dan pegawai Pusdatin; dan
- Data pemanfaatan email dilakukan sebanyak 2 kali sebulan yaitu pada tanggal 20 dan akhir bulan, data tanggal 20 pada bulan tersebut digunakan unit untuk melakukan kontrol terhadap pemanfaatan email di unit.

5. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Salah satu kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator indeks pengelolaan data dan informasi, di antaranya adalah metode pengingat rutin yang dilakukan di setiap awal bulan kepada PIC atau petugas verifikasi dashboard BOC dan adanya penugasan tim untuk melakukan verifikasi sehingga tidak dibebankan kepada satu petugas saja. Kemudian penambahan fitur *monitoring* capaian indikator indeks pengelolaan data dan informasi pada aplikasi BOC sehingga pengguna tertarik untuk sering memanfaatkan sistem tersebut.

Sedangkan pemanfaatan email, tim Pusdatin secara aktif meningkatkan *awareness* seluruh pegawai melalui Tim TI di Unit Pusat dan UPT untuk menggunakan email serta melakukan perhitungan sebanyak 2x setiap bulan sebagai *early warning system* pada bulan berjalan dan perhitungan pemanfaatan email setiap bulan. Selain itu, adanya penambahan fitur status email aktif dan tidak aktif pada dashboard BOC memudahkan pemilik akun untuk melakukan pengecekan pemanfaatan penggunaan email sehingga nilai indeks pengelolaan data dan informasi, khususnya dalam pemanfaatan email Badan POM dapat dimanfaatkan secara optimal.

## 6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	190.870.000	66.854.000	35,03%	100%	75% (tidak efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **belum efisien** karena capaian indikator masih lebih rendah daripada % realisasi anggaran. Hal ini disebabkan karena perencanaan penggunaan anggaran telah disusun untuk kegiatan yang akan dilakukan pada Triwulan III dan Triwulan IV.

## 7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	-	-	-
Rekomendasi Perbaikan (pada lapkin 2023)	Perlu mempertahankan pencapaian indeks tersebut dengan tetap melakukan <i>reminder</i> dan <i>awareness</i> terhadap pemanfaatan BCC dan email.		
Rencana Aksi	Melakukan reminder bulanan terhadap pemanfaatan akun Eselon 2 serta reminder pemutakhiran data oleh akun PIC Unit, dan juga melakukan <i>awareness</i> serta monitoring penggunaan email ketika data penggunaan email sudah dirilis		
Kondisi sebelum Rencana Aksi	1. Pemanfaatan akun Eselon 2 kurang aktif sehingga nilai pada beberapa bulan tidak maksimal 2. Penggunaan email belum dilakukan oleh semua staf Pusdatin		
Kondisi Setelah Rencana Aksi	1. Pemanfaatan akun Eselon 2 menjadi lebih aktif dan mendapatkan nilai maksimal pada tiap bulannya 2. Penggunaan Email <i>corporate</i> staf pusdatin mencapai 85% lebih		
Timeline	Akhir Tahun 2024	Akhir Tahun 2024	Akhir Tahun 2024
Status	Belum Close	Belum Close	Belum Close

## 8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan Kinerja yang disusun setiap triwulan membantu menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan demi tercapainya target indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal. Dengan adanya proses *monitoring* setiap bulan membantu untuk memastikan tercapainya kinerja ini.

### Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan

#### 1. Perbandingan target dan realisasi triwulan II Tahun 2024

BULAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Januari	75%	79,08%	105,44%	Sangat Baik	Efektif
Februari	75%	79,57%	106,09%	Sangat Baik	Efektif
Maret	80%	81,17%	101,46%	Sangat Baik	Efektif

April	80%	82,68%	103,35%	Sangat Baik	Efektif
Mei	80%	83,32%	104,15%	Sangat Baik	Efektif
Juni	85%	85,92%	101,08%	Sangat Baik	Efektif


Dengan demikian, capaian persentase pemenuhan standar sistem informasi, infrastruktur, data dan keamanan pada triwulan II tahun 2024 telah mencapai target triwulan II yang ditetapkan yaitu 101,08% dengan kriteria SANGAT BAIK.

**2. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2024 dengan triwulan sebelumnya**

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Realisasi TW II	% Capaian TW II
Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	81,17%	81,17%	85,92%	85,92%

Terdapat peningkatan capaian kinerja pada triwulan II dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I. Dimana triwulan I capaian kinerjanya hanya 81,17% dibandingkan dengan target tahunan, sedangkan pada triwulan II capaian kinerjanya sebesar 85,92% dari target tahunan yang telah ditentukan sebesar 100%.

**3. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II Tahun 2024 dengan target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target TW II	Target Tahunan	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria Terhadap Target tahunan
Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	85%	100%	85,92%	85,92%	 Akan Tercapai

Realisasi persentase pemenuhan standar sistem informasi, infrastruktur, data dan keamanan triwulan II Tahun 2024 belum mencapai target Tahun 2024 dengan kriteria **Akan Tercapai**. Namun demikian capaian per bulan sudah mencapai target yang telah ditentukan.

**4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja dan upaya perbaikan kinerja pada triwulan II tahun 2024 adalah:

a. Standar Infrastruktur

Belum ada peningkatan kinerja untuk indikator pemenuhan standar infrastruktur TIK, hal ini disebabkan karena:

- 1) Kepka tentang Standarisasi Infrastruktur TIK disahkan oleh Plt.Kepala Badan POM pada 2 Juli 2024 sehingga sosialisasi dan rewiu terhadap pemenuhan standar infrastruktur TIK ke UPT akan dilaksanakan mulai triwulan 3 2024; dan
- 2) Pusdatin telah melakukan rewiu target dan penetapan UPT yang topologi jaringannya memenuhi standar.

b. Standar Data

Penyusunan Standar Data Statistik Nasional yang merupakan salah satu prinsip Satu Data Indonesia pada Data Prioritas dan merupakan salah satu indikator pada domain penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) yang dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan unit produsen data. Dalam Penyusunan Standar Data

Statistik Nasional, Pusdatin juga didampingi dan direviu oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selaku Instansi Pembina Statistik.

- c. Standar Sistem Informasi
  - 1) Pusdatin telah melakukan Sosialisasi Kebijakan Standar Pengembangan atau Pembangunan aplikasi di Lingkungan Badan POM No 445 tahun 2023 tentang Standar pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE di lingkungan Badan POM pada tanggal 23 Januari 2024 kepada seluruh unit pusat dan UPT di lingkungan Badan POM yang dilakukan secara Hybrid.
  - 2) Pusdatin telah melakukan finalisasi Tools Rekomendasi Aplikasi bersama dengan konsultan dari Universitas Indonesia. Tools ini menjadi dasar pertimbangan evaluasi dan pemberian rekomendasi pengembangan atau pembangunan aplikasi di BPOM untuk melakukan penilaian terhadap aplikasi yang diajukan ke Pusdatin
- d. Standar Keamanan  
Penyusunan dan penyampaian rencana pelaksanaan VA dan Pentest menjadi acuan dan mempermudah dalam monitoring dan evaluasi progress pelaksanaan VA dan Pentest. Terhadap target kegiatan yang telah direncanakan belum sesuai atau tidak bisa dilaksanakan karena adanya kendala, maka dilakukan penyesuaian target aplikasi.

#### 5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu:

- a. Kepka tentang Standarisasi Infrastruktur TIK telah disahkan oleh Plt.Kepala Badan POM pada 2 Juli 2024;
- b. Pusdatin akan melakukan bimbingan teknis layanan infrastruktur dan pendampingan pembangunan jaringan untuk UPT dimulai awal bulan Mei 2024;
- c. Telah dilaksanakan pertemuan Rapat Koordinasi Penghimpunan Metadata Statistik
- d. Telah dilaksanakan Sosialisasi Kebijakan Standar Pengembangan atau Pembangunan aplikasi di Lingkungan Badan POM No 445 tahun 2023 tentang Standar pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE di lingkungan Badan POM pada tanggal 23 Januari 2024. Dimana Standar ini nantinya akan menggantikan Keputusan Kepala Badan POM No 102 Tahun 2022 tentang Standar Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Badan POM. Sosialisasi ini dilakukan secara Hybrid dengan mengundang seluruh unit pusat dan UPT di lingkungan Badan POM; dan
- e. Telah dilaksanakan rapat Finalisasi Tools Rekomendasi Aplikasi pada tanggal 19 dan 21 Februari 2024 bersama dengan konsultan dari Universitas Indonesia dan mengundang seluruh tim di Pusdatin. Tools ini menjadi dasar pertimbangan evaluasi dan pemberian rekomendasi pengembangan atau pembangunan aplikasi di BPOM untuk melakukan penilaian terhadap aplikasi yang diajukan ke Pusdatin.
- f. Telah melakukan reviu terhadap SOP pelaksanaan ITSA menyesuaikan rekomendasi hasil Audit ISO 27001 serta menyesuaikan kebutuhan.
- g. Telah dilaksanakan monitoring terhadap progress pelaksanaan ITSA (baik pentest dan VA)

#### 6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	568.088.000	355.887.000	62,64%	85,92%	90% (efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **telah efisien** karena capaian indikator sudah lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Salah satu hal yang menyebabkan tingkat efisiensinya mencapai kriteria efisien adalah

pelaksanaan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan reviu dokumen kebijakan yang mendukung tercapainya indikator ini sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.

#### 7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	Standar Infrastruktur: 1) Belum ditetapkannya Kebijakan standar infrastruktur setelah dilaksanakan reviu kebijakan		
Rekomendasi Perbaikan (pada lapkin 2023)	Standar Infrastruktur 1) Reviu dan menetapkan standar infrastruktur yang baru; 2) Reviu target dan penetapan UPT yang topologi jaringannya memenuhi standar; 3) Bimtek layanan infrastruktur TIK dan pendampingan pembangunan jaringan untuk UPT yang masih dalam tahap Pembangunan gedung baru;  Standar Data 1) Melakukan pemutakhiran standar data		
Rencana Aksi	Standar Infrastruktur: 1) Melakukan Reviu dan menetapkan kebijakan standar infrastruktur TIK yang mutakhir; 2) Melakukan reviu target dan penetapan terhadap UPT yang telah memenuhi standar topologi jaringan yang ditetapkan; 3) Melaksanakan Bimbingan Teknis Infrastruktur TIK serta pendampingan terhadap pembangunan topologi jaringan sesuai standar pada UPT yang dalam proses pembangunan lokasi kerja baru;  Standar Data: 1) Melakukan pemutakhiran standar data		
Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kebijakan Standar Infrastruktur TIK masih dalam proses reviu		
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Standar Infrastruktur 1) Keputusan Kepala Badan POM tentang Standar Infrastruktur TIK telah disahkan oleh Plt. Kepala Badan POM pada 02 Juli 2024.  Standar Data 1) Standar data statistik nasional telah dilakukan pemutakhiran		
Timeline	TW 2 - TW 4		
Status	Close	Close	Close

#### 8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja diantaranya:

- a. Sebagai monitoring pengembangan aplikasi, yang akan membantu untuk memastikan kesesuaian pengembangan aplikasi dengan standar yang ada untuk tujuan tercapainya integrasi layanan sistem informasi di Badan POM;
- b. Mengukur atau menilai sejauh mana target Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Standar Infrastruktur, Standar Keamanan dan Standar Data akan tercapai; dan
- c. Sebagai monitoring implementasi standar infrastruktur TIK, sejalan dengan perkembangan organisasi di Badan POM serta update teknologi. Sehingga perlu dilakukan pembaharuan secara terus menerus dan monev berkelanjutan.

## Sertifikasi ISO 27001

- 1. Perbandingan target dan realisasi triwulan II Tahun 2024**

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun dan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi.
- 2. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2024 dengan triwulan sebelumnya**

Pada triwulan II Tahun 2024 belum diperoleh hasil pengukuran Sertifikasi ISO 27001 yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi, sehingga tidak dapat dibandingkan hasilnya. Hasil Sertifikasi ISO 27001 baru dapat diperoleh pada bulan Desember 2024, dikarenakan *assessment* penilaian dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2024.
- 3. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II Tahun 2024 dengan target Tahun 2024**

Capaian realisasi Sertifikasi ISO 27001 didapat pada akhir tahun, sehingga pada triwulan II Tahun 2024 belum didapatkan hasil pengukuran Sertifikasi ISO 27001.
- 4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**
  - a. Sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman Pegawai Pusdatin dalam implementasi ISO Series di lingkungan pusdatin maka perlu dilakukan *awarness* secara berkala kepada seluruh Pegawai Pusdatin. Dan Pada Triwulan 1 ini *awarness* yang baru akan dilaksanakan yaitu ISO 37001:2016 dan ISO 9001:2015, dan untuk pelaksanaan *awarness* ISO 27001:2022, dan 20000-1:2018 rencananya akan dilaksanakan pada Triwulan II; dan
  - b. Untuk ISO 27001:2022 di baru akan diterapkan di Pusdatin pada tahun 2024 ini, karena pada tahun sebelumnya yang di sertifikasi adalah ISO 27001:2013, dan pada tahun ini ISO 27001:2013 sudah tidak diterapkan di indonesia digantikan dengan ISO 27001:2022. untuk itu dalam upaya penerapan ISO 27001:2022 diperlukan peningkatan kompetensi SDM Pusdatin melalui pelatihan ISO 27001:2022, lalu setelah itu baru akan dilaksanakan *awarness* kepada seluruh Pegawai Pusdatin, hal ini rencananya akan dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2024.
- 5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja dapat tercapai akibat beberapa kegiatan, antara lain:

  - a. Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pemahaman Pegawai Pusdatin dalam implementasi ISO 37001:2016, maka perlu dilakukan *awarness* secara berkala kepada seluruh Pegawai Pusdatin. *Awarness* ISO 37001:2016 telah dilaksanakan di 19 Februari 2024 kepada seluruh Pegawai Pusdatin melalui media online Zoom Meeting;
  - b. Sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman Pegawai Pusdatin dalam implementasi ISO 9001:2015, maka perlu dilakukan *awarness* secara berkala kepada seluruh Pegawai Pusdatin. *Awarness* ISO 9001:2015 telah dilaksanakan di 26 Februari 2024 kepada seluruh Pegawai Pusdatin melalui media online Zoom Meeting;
  - c. Pelaksanaan *awarness* ISO 27001:2022, dan 20000-1:2018 rencananya akan dilaksanakan pada Triwulan II;
  - d. Pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM Pusdatin daam rangka penerapan ISO 27001:2022 melalui pelatihan ISO 27001:2022 yang rencananya akan dilaksanakan pada Triwulan II; dan
  - e. Reviu dan revisi dokumen ISO Series sebagai dokumen kelengkapan dalam pelaksanaan audit ISO mendatang.

## 6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi anggaran pada triwulan II Tahun 2024 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator. Indikator ini didukung oleh 1 (satu) komponen kegiatan yaitu Pelaksanaan Audit ISO Series. Pada bulan Mei mengalami perubahan anggaran yang semula Rp.382.000.000,-- menjadi Rp.374.390.000,--, perubahan ini disebabkan oleh adanya kebutuhan rapat dan pembahasan yang cukup intens dalam implementasi ISO Series di Pusdatin sehingga diperlukan penambahan biaya konsumsi rapat di dalam kantor. Hingga bulan Juni realisasi anggaran pada indikator ini adalah Rp.134.442.000,--

## 7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
<b>Kendala/ Permasalahan</b>	-	-	-
<b>Rekomendasi Perbaikan</b>	1) Melakukan update kelengkapan data dukung menuju standar ISO series; dan 2) Melakukan perbaikan untuk BCP test tahun 2024 untuk dilakukan dengan skenario kegagalan total di lingkungan DC utama (PDN1) yang menyebabkan aplikasi ASROT dan e-sertifikasi tidak dapat diakses secara total, dan kemudian dijalankan proses <i>recovery/fail over</i> termasuk <i>restore</i> data backup di lingkungan DRC (PDN2) ke VPS yang sudah 'ready for use'.		
<b>Rencana Aksi</b>	-	-	1) Melakukan update kelengkapan data dukung menuju standar ISO Series 2) Melakukan reviu dan revisi dokumen ISO Series
<b>Kondisi sebelum Rencana Aksi</b>	-	-	-
<b>Kondisi Setelah Rencana Aksi</b>	-	-	1) Melakukan update kelengkapan data dukung menuju standar ISO Series 2) Melakukan reviu dan revisi dokumen ISO Series
<b>Timeline</b>	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun
<b>Status</b>	Belum close	Belum close	Belum close

## 8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, diperoleh informasi bahwa realisasi IKU Tahun 2023 telah tercapai dengan capaian 100%. Namun demikian Pusdatin masih harus mempertahankan sertifikasi ISO 27001 pada Tahun 2024.

## SASARAN KEGIATAN 9

### Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi secara Akuntabel

#### Nilai Kinerja Anggaran

#### 1. Perbandingan target dan realisasi triwulan II Tahun 2024

BULAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Januari	52	41,82	80,42%	Cukup	Kurang Efektif
Februari	52	46,22	88,88%	Cukup	Kurang Efektif
Maret	60	49,94	83,23%	Cukup	Kurang Efektif
April	-	48,35	-	-	-
Mei	-	49,22	-	-	-
Juni	-	49,53	-	-	-

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Terdapat perubahan cara perhitungan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang awalnya memuat 13 (tiga belas) indikator berubah menjadi 7 (tujuh) indikator dan mencerminkan aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran, serta aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran. 7 (tujuh) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, serta Capaian Output. Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi OM SPAN. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai EKA diperoleh dari aplikasi SMART. Realisasi nilai kinerja anggaran Pusdatin sudah tidak dihitung per triwulan, sesuai dengan Surat dari Biro Perencanaan dan Keuangan tanggal 14 Mei 2024 perihal Revisi Target Nilai Kinerja Anggaran pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2024, namun tetap dilakukan monitoring secara berkala sehingga pada triwulan II capaian Nilai Kinerja Anggaran sementara adalah 49,53, diperoleh 50% dari nilai IKPA bulan Juni 99,05.

#### 2. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2024 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2024 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya hal ini sehubungan dengan adanya Surat dari Biro Perencanaan dan Keuangan tanggal 14 Mei 2024 perihal Revisi Target Nilai Kinerja Anggaran pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2024 yang menginstruksikan bahwa Nilai Kinerja Anggaran akan dinilai pada akhir tahun. Sehingga pada triwulan II tidak ada capaian yang dapat di bandingkan dengan capaian triwulan I.

3. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan II Tahun 2024 dengan target Tahun 2024**  
 Capaian realisasi Nilai Kinerja Anggaran didapat pada akhir tahun, sehingga pada triwulan II Tahun 2024 belum didapatkan hasil pengukuran Nilai Kinerja Anggaran.

4. **Analisis penyebab penurunan capaian kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Triwulan II Tahun 2024 belum mencapai target triwulan II tahun 2024. Hal ini disebabkan karena terdapat peraturan terbaru dari Kementerian Keuangan terkait komposisi perhitungan NKA yaitu 50% Nilai IKPA dan 50% Nilai EKA, dimana pada Bulan Januari-November nilai EKA tidak menjadi komponen penghitung sehingga hanya Nilai IKPA yang dinilai. Sehingga Nilai Kinerja Anggaran Triwulan II yang didapat ialah  $50\% \times 99,05 = 49,53$ .

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN LP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	175	063	632458	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	Nilai	100,00	100,00	95,23	100,00	100,00	100,00	100,00	99,05	100%	0,00	99,05
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	15,00	19,05	10,00	10,00	10,00	25,00				
					Nilai Aspek		100,00			98,81		100,00				

Dikarenakan target telah disusun sebelum peraturan ditetapkan, maka target TW I masih menggunakan perhitungan NKA yang lama dengan komposisi 50% Nilai IKPA dan 50% Nilai EKA. Alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Pusdatin adalah melakukan revisi target April – November pada Mei 2024.

5. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan II Tahun 2024 untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai kinerja anggaran adalah pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan target-target indikator pada penilaian IKPA, penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu, dan koordinasi serta konsultasi secara internal maupun eksternal (KPPN Jakarta VI dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi DKI).

6. **Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai Kinerja Anggaran	14.955.712.000	4.275.421.570	28,58%	49,94%	90% (efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **telah efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Perlu dilakukan percepatan realisasi anggaran agar anggaran yang dikeluarkan dapat mendukung tercapainya target IKU di akhir tahun.

7. **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/Permasalahan	Sering terjadinya pencairan yang tidak sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan sebelumnya.	Rendahnya nilai indikator deviasi halaman III DIPA menyebabkan NKA tidak maksimal.	Rendahnya nilai indikator penyerapan anggaran menyebabkan NKA tidak maksimal.
Rekomendasi Perbaikan	Memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada Halaman III DIPA;	Melakukan update Halaman III DIPA setiap Triwulan dan memastikan deviasi Halaman III DIPA tidak melebihi 5%.	Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

Keterangan	April	Mei	Juni
Rencana Aksi	Memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada Halaman III DIPA;	Melakukan update Halaman III DIPA setiap Triwulan dan memastikan deviasi Halaman III DIPA tidak melebihi 5%.	Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun.
Kondisi sebelum Rencana Aksi	Nilai IKPA (yang menjadi komponen penghitung NKA) pada indikator Halaman III DIPA tidak maksimal	Nilai IKPA (yang menjadi kompoten penghitung NKA) pada indikator Halaman III DIPA tidak maksimal	Nilai IKPA (yang menjadi komponen penghitung NKA) pada indikator Penyerapan Anggaran tidak maksimal
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Nilai IKPA TW II pada indikator Halaman III DIPA mendapat 100 poin.	Nilai IKPA TW II pada indikator Halaman III DIPA mendapat 100 poin dengan deviasi sebesar 0,87%.	-
Status	Close	Close	Close
Timeline	1 tahun	1 tahun	1 tahun

## 8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja membantu mengukur atau menilai sejauh mana target nilai kinerja anggaran dapat tercapai. Dengan adanya proses monitoring setiap bulan membantu untuk memastikan tercapainya pengukuran kinerja ini dan langkah-langkah yang perlu disiapkan apabila target tidak tercapai.

### Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

#### 1. Perbandingan target dan realisasi triwulan II Tahun 2024

BULAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Januari	30	70	233,33%	Tidak dapat disimpulkan	
Februari	35	70	200%	Tidak dapat disimpulkan	
Maret	40	75	187,5%	Tidak dapat disimpulkan	
April	45	75	166,67%	Tidak dapat disimpulkan	
Mei	50	75	150%	Tidak dapat disimpulkan	
Juni	55	80	145,45%	Tidak dapat disimpulkan	

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa merupakan IKU baru yang diturunkan dari Biro Umum di tahun 2024 ini. Komponen perhitungan realisasi capaian dihitung oleh Biro Umum melalui aplikasi SIROUM, dimana pada Tahun 2023 hanya di dapat nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa per tahun, sehingga dalam menentukan target kinerja tahun 2024 per bulan belum terdapat baseline yang dapat diacu. Oleh sebab itu Pusdatin menetapkan target minimal untuk setiap bulannya selain itu terdapat percepatan proses


pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pada TW I dan TW II, hal inilah yang membuat capaian kinerja Pusdatin tidak dapat disimpulkan karena melebihi 120%. Dengan demikian, capaian nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa pada triwulan I tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 187,5 % dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN.

**2. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2024 dengan triwulan sebelumnya**

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Realisasi TW II	% Capaian TW II
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	75	92,59%	80	98,76%

Terdapat peningkatan capaian kinerja pada triwulan II dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan I. Dimana triwulan I realisasi kinerjanya hanya 75 dibandingkan dengan target tahunan, sedangkan pada triwulan II realisasi kinerjanya sebesar 80 dari target tahunan yang telah ditentukan sebesar 81.

**3. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II Tahun 2024 dengan target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target TW II	Target Tahunan	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria Terhadap Target Tahunan
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	55	81	80	98,76%	 Akan Tercapai

Realisasi nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa triwulan II Tahun 2024 belum mencapai target Tahun 2024 dengan kriteria **Akan Tercapai**. Namun demikian capaian per bulan sudah mencapai target yang telah di tentukan.

**4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Analisis penyebab keberhasilan:

- a. Monitoring intensif oleh petugas terhadap jenis dan ketersediaan paket pengadaan baik yang dilakukan oleh penyedia ataupun swakelola yang tayang pada SIRUP LKPP;
- b. Monitoring intensif oleh petugas terhadap paket pengadaan baik yang melalui E-Tender, E-Purchasing, E-Kontrak, maupun non e-tender dan non e-purchasing; dan
- c. Koordinasi dengan unit teknis dan penyedia terkait dalam penyelenggaraan pemenuhan barang dan jasa.

Upaya Perbaikan

Masih terdapat Paket pekerjaan yang sudah dikontrakkan akan tetapi masih dalam masa pelaksanaan pekerjaan sehingga statusnya pada aplikasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (SPSE) masih belum selesai.

**5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Segara dilakukannya proses pengadaan untuk paket pekerjaan yang belum dilaksanakan serta melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi oleh petugas secara berkala terhadap pengadaan barang dan jasa baik yang dilakukan melalui e-kontrak, e-catalogue atau pengadaan langsung yang memerlukan pencatatannya pada LPSE.

## 6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	1.116.807.000	1.105.880.000	99,02%	98,76%	75% (tidak efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **belum efisien** karena capaian indikator masih lebih rendah daripada % realisasi anggaran. Hal ini disebabkan karena masih adanya pengadaan yang selesai pada akhir tahun sehingga belum bisa dilakukan penyelesaian dan penilaian penyedia pada akun LPSE.

## 7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
<b>Kendala/Permasalahan</b>	-	-	-
<b>Rekomendasi Perbaikan</b>	-	-	-
<b>Rencana Aksi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisi Penginputan dan monitoring Paket Pengadaan SIRUP sampai diumumkan</li> <li>- Penginputan Paket Pengadaan pada aplikasi LPSE untuk pengadaan elektronik sampai pemberian penilaian penyedia</li> <li>- Penginputan Paket Pengadaan melalui e-catalog sampai pemberian penilaian penyedia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisi Penginputan dan monitoring Paket Pengadaan SIRUP sampai diumumkan</li> <li>- Penginputan Paket Pengadaan pada aplikasi LPSE untuk pengadaan elektronik sampai pemberian penilaian penyedia</li> <li>- Penginputan Paket Pengadaan melalui e-catalog sampai pemberian penilaian penyedia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisi Penginputan dan monitoring Paket Pengadaan SIRUP sampai diumumkan</li> <li>- Penginputan Paket Pengadaan pada aplikasi LPSE untuk pengadaan elektronik sampai pemberian penilaian penyedia</li> <li>- Penginputan Paket Pengadaan melalui e-catalog sampai pemberian penilaian penyedia</li> </ul>
<b>Kondisi sebelum Rencana Aksi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum termonitoring paket pengadaan di SIRUP</li> <li>- Belum Terinputnya paket pengadaan pada aplikasi LPSE sampai dengan pemberian penilaian penyedia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum termonitoring paket pengadaan di SIRUP</li> <li>- Belum Terinputnya paket pengadaan pada aplikasi LPSE sampai dengan pemberian penilaian penyedia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum termonitoring paket pengadaan di SIRUP</li> <li>- Belum Terinputnya paket pengadaan pada aplikasi LPSE sampai dengan pemberian penilaian penyedia</li> </ul>
<b>Kondisi Setelah Rencana Aksi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah termonitoring paket pengadaan yang telah terinput pada SIRUP LKPP</li> <li>- Telah Terinputnya paket pengadaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah termonitoring paket pengadaan yang telah terinput pada SIRUP LKPP</li> <li>- Telah Terinputnya paket pengadaan pada aplikasi LPSE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah termonitoring paket pengadaan yang telah terinput pada SIRUP LKPP</li> <li>- Telah Terinputnya paket pengadaan pada aplikasi LPSE</li> </ul>

	pada aplikasi LPSE sampai dengan penilaian penyedia	sampai dengan penilaian penyedia	sampai dengan penilaian penyedia
<b>Timeline</b>	-	-	-
<b>Status</b>	Close	Close	Close

#### 8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pada laporan kinerja tahun 2023, belum terdapat IKU Nilai Pengelolaan Barang dan Jasa dikarenakan Nilai Pengelolaan Barang dan Jasa baru masuk ke IKU Pusdatin pada tahun 2024. Namun pada tahun 2023 sudah dilakukan penilaian pengelolaan Barang dan Jasa dan hasilnya mengalami peningkatan dari tahun 2022, sehingga perlu upaya untuk terus meningkatkan nilai pengelolaan Barang dan Jasa berupa Monitoring paket pengadaan pada SIRUP LKPP dan paket pengadaan pada Aplikasi LPSE.

### Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

#### 1. Perbandingan target dan realisasi triwulan II Tahun 2024

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun dan dilakukan oleh Biro Umum.

#### 2. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2024 dengan triwulan sebelumnya

Pada triwulan II Tahun 2024 belum diperoleh hasil pengukuran Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara yang dilaksanakan oleh Biro Umum, sehingga tidak dapat dibandingkan hasilnya. Hasil Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara baru dapat diperoleh pada bulan Desember 2024, dikarenakan assessment penilaian dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2024.

#### 3. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II Tahun 2024 dengan target Tahun 2024

Capaian realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara didapat pada akhir tahun, sehingga pada triwulan II Tahun 2024 belum didapatkan hasil pengukuran Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara.

#### 4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penyampaian laporan BMN tepat waktu, cepat dalam mendaftarkan aset yang belum dilakukan pendaftaran penggunaan aset, dan rutusnya penilaian BMN yang dalam kondisi rusak berat yang nantinya akan dilakukan pengajuan permohonan penghapusan aset menjadi faktor yang mendorong nilai pengelolaan aset PUSDATIN meningkat.

#### 5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Peningkatan dalam penatausahaan BMN seperti penetapan status penggunaan aset dilakukan dengan cepat, aset yang sudah rusak berat juga segera dilakukan penghapusan. Kecepatan dan ketepatan dalam penyampaian Laporan BMN meningkatkan kenaikan nilai Pengelolaan BMN.

#### 6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Efisiensi anggaran pada triwulan II Tahun 2024 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator. Indikator ini didukung oleh 1 (satu) komponen kegiatan yaitu Perawatan Gedung dan Bangunan. Hingga bulan Juni realisasi anggaran pada indikator ini adalah Rp.1.105.880.000,--

## 7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	April	Mei	Juni
<b>Kendala/Permasalahan</b>	-	-	-
<b>Rekomendasi Perbaikan</b>	-	-	-
<b>Rencana Aksi</b>	Pengajuan Penetapan Status Penggunaan Aset ke Pengguna Barang Badan POM	1) Membuat list barang yang ingin di transfer ke PPSDM 2) Penata usahaan BMN 3) Membuat list barang yang ingin di hapuskan 4) pengimputan PSP ke SIMAN karena sudah disetujui oleh KPKNL	1) Membuat surat permohonan penghapusan barang milik negara yang sudah rusak berat 2) Penata Usahaan BMN
<b>Kondisi sebelum Rencana Aksi</b>	Masih ada barang dalam kondisi rusak berat yang belum dilakukan pengusulan penghapusan BMN		
<b>Kondisi Setelah Rencana Aksi</b>	untuk saat ini belum ada BMN yang dalam kondisi rusak berat		
<b>Timeline</b>	TW II	TW II	TW II
<b>Status</b>	Sudah close	Sudah close	Sudah close

## 8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pada laporan kinerja tahun 2023, belum terdapat IKU Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dikarenakan Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara baru masuk ke IKU Pusdatin pada tahun 2024. Namun pada tahun 2023 sudah dilakukan penilaian pengelolaan Barang Milik Negara dan hasilnya mengalami peningkatan dari tahun 2022, sehingga perlu upaya untuk terus meningkatkan nilai pengelolaan Barang Milik Negara berupa meningkatkan kinerja penata usahaan BMN seperti penetapan status penggunaan BMN, penghapusan BMN, menyampaikan pelaporan BMN secara tepat waktu, dan mengerjakan laporan RKBMN tepat waktu.

### Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

#### 1. Perbandingan target dan realisasi triwulan II Tahun 2024

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun dan dilakukan oleh Biro Umum.

#### 2. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II Tahun 2024 dengan triwulan sebelumnya

Pada triwulan II Tahun 2024 belum diperoleh hasil pengukuran Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Biro Umum, sehingga tidak dapat dibandingkan hasilnya. Hasil Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri baru dapat diperoleh pada bulan Desember 2024, dikarenakan *assessment* penilaian dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2024.

#### 3. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II Tahun 2024 dengan target Tahun 2024

Capaian realisasi Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri didapat pada akhir tahun, sehingga pada triwulan II Tahun 2024 belum didapatkan hasil pengukuran persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri.

**4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Penyebab keberhasilan

- Monitoring intensif oleh petugas terhadap penggunaan produk dalam negeri baik pada belanja barang dan belanja modal;
- Melakukan input PDN dan TKDN pada realisasi SAKTI; dan
- Koordinasi dengan unit teknis dan penyedia terkait dalam meningkatkan produk dalam negeri serta pembelian kebutuhan menggunakan produk dalam negeri

Upaya perbaikan

Lebih banyak penggunaan produk dalam negeri.

**5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Pengadaan dan pembelian kebutuhan lainnya akan menggunakan produk dalam negeri baik belanja barang dan modal serta melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi penggunaan produk dalam negeri.

**6. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Efisiensi anggaran pada triwulan II Tahun 2024 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator. Indikator ini didukung oleh 1 (satu) komponen kegiatan yaitu Tata Kelola Infrastruktur TIK. Pada bulan Juni mengalami perubahan anggaran yang semula Rp.8.470.688.000,-- menjadi Rp.8.441.091.000,--, perubahan ini disebabkan oleh terdapatnya negosiasi belanja modal peratalan dan mesin dari pagu yang dianggarkan pada saat melakukan pengadaan sehingga anggaran dapat diefisiensikan Hingga bulan Juni realisasi anggaran pada indikator ini adalah Rp.7.767.324.402,--

**7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

Keterangan	April	Mei	Juni
<b>Kendala/Permasalahan</b>	-	-	-
<b>Rekomendasi Perbaikan</b>	-	-	-
<b>Rencana Aksi</b>	- Penggunaan produk dalam negeri pada belanja barang dan modal - Monitoring dan evaluasi penggunaan produk dalam negeri	- Penggunaan produk dalam negeri pada belanja barang dan modal - Monitoring dan evaluasi penggunaan produk dalam negeri	- Penggunaan produk dalam negeri pada belanja barang dan modal - Monitoring dan evaluasi penggunaan produk dalam negeri
<b>Kondisi sebelum Rencana Aksi</b>	-	-	-
<b>Kondisi Setelah Rencana Aksi</b>	Persentase penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada TW III atau IV	Persentase penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada TW III atau IV	Persentase penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada TW III atau IV
<b>Timeline</b>	TW III	TW III	TW III
<b>Status</b>	belum close	belum close	belum close

**8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Pada laporan kinerja tahun 2023, belum terdapat IKU Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri dikarenakan IKU tersebut baru masuk ke IKU Pusdatin pada tahun 2024. Sehingga perlu upaya untuk terus meningkatkan nilai pengelolaan Barang Milik Negara agar mencapai target yang telah ditentukan berupa Penggunaan produk dalam negeri pada belanja barang dan modal.

## B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan pengelolaan anggaran di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sudah dilakukan dengan prinsip akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) dan transparan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi.

Penyerapan anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan untuk Program Dukungan Manajemen (Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan) pada triwulan II tahun 2024 sebanyak 50,03%.

Target		Realisasi		Persentase	
Kegiatan	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Kegiatan	Realisasi Anggaran
44	49.458.463.000	44	24.743.212.550	70,39%	50,03%

Tabel Target dan Realisasi Anggaran Pusdatin

Berikut realisasi anggaran per output pada triwulan II tahun 2024 per tanggal 30 Juni 2024:

No	Nama Program/Kegiatan/Rincian Output/SubOutput	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	700.000	661.280	94,47
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal	22.331.101	10.629.648	47,60
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	500.000	444.600	88,92
4	Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang realtime, dikembangkan dan terintegrasi	25.927.362	13.933.175	53,74

Berikut realisasi anggaran per kegiatan pada triwulan II tahun 2024 per tanggal 30 Juni 2024:

Lampiran 4a

TABEL MONITORING - EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN  
s/d 30 JUNI 2024

NAMA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN

: PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN  
: 2024

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI S.D APRIL		REALISASI S.D MEI		REALISASI S.D JUNI	
			KEUANGAN		KEUANGAN		KEUANGAN	
			Rupiah (Rp)	Persentase (%)	Rupiah (Rp)	Persentase (%)	Rupiah (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			-	(9)	(8)	(9)	(8)	(9)
1	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	672.207.000	450.930.000	67,08%	661.280.000	98,37%	661.280.000	98,37%
1	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	672.207.000	450.930.000	67,08%	661.280.000	98,37%	661.280.000	98,37%
2	Layanan Perkantoran	6.569.774.000	3.024.645.728	46,04%	4.309.171.513	65,59%	4.637.565.037	70,59%
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	6.569.774.000	3.024.645.728	46,04%	4.309.171.513	65,59%	4.637.565.037	70,59%
3	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	15.761.327.000	3.261.334.043	20,69%	11.236.664.442	71,29%	5.553.289.277	35%
3	Pemeliharaan Technical Support e-Government	1.050.000.000	0	0,00%	708.453.800	67,47%	150.314.590	14,32%
4	Pengadaan Peralatan Perlengkapan Perkantoran dan Penambah Daya Tahan Tubuh	436.190.000	154.918.700	35,52%	186.588.420	42,78%	219.417.720	50%
5	Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4/6/10	37.000.000	6.445.380	17,42%	18.148.846	49,05%	20.240.472	55%
6	Administrasi Kegiatan	2.682.434.000	499.273.000	18,61%	1.008.748.500	37,61%	840.838.000	31,35%
7	Langganan Daya dan Jasa	1.440.597.000	128.080.311	8,89%	197.140.690	13,68%	242.822.513	16,86%
8	Perawatan Gedung dan Bangunan	235.120.000	6.831.500	2,91%	39.204.100	16,67%	48.189.000	20,50%
9	Peningkatan Akuntabilitas dan Evaluasi Kegiatan Pusdatin	323.328.000	95.464.209	29,53%	128.838.514	39,85%	156.000.042	48,25%
10	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	190.390.000	0	0,00%	0	0,00%	190.351.800	99,98%
11	Jasa Keamanan dan Pengamanan	220.000.000	51.255.000	23,30%	205.020.000	93,19%	85.425.000	38,83%
12	Penataan dan Pengamanan Arsip Pusdatin	69.828.000	10.159.000	14,55%	10.159.000	14,55%	10.159.000	14,55%
13	Sewa Kendaraan Bermotor	319.560.000	319.560.000	100,00%	319.560.000	100,00%	319.560.000	100%
14	Layanan Koneksi Jaringan	2.694.000.000	449.000.000	16,67%	2.694.000.000	100,00%	898.000.000	33,33%
15	Pemeliharaan Infrastruktur TIK	6.062.880.000	1.540.346.943	25,41%	5.720.802.572	94,36%	2.371.971.140	39%
4	Layanan Prasarana Internal	444.600.000	444.600.000	100,00%	444.600.000	100,00%	444.600.000	100%
16	Sarana Gedung Pninsi Satker Pusdatin	444.600.000	444.600.000	100,00%	444.600.000	100,00%	444.600.000	100%
5	Pengembangan E-Government	5.734.638.000	737.589.370	12,86%	1.654.249.757	28,85%	1.215.512.393	21%
17	Tata Kelola Sistem Informasi Layanan External	2.883.490.000	402.428.025	13,96%	872.320.687	30,25%	585.394.212	20,30%
18	Tata Kelola Sistem Informasi Layanan Internal	2.258.473.000	272.833.345	12,08%	535.468.070	23,71%	443.187.681	19,62%
19	Pengembangan Data dan Informasi pada Badan POM Command Center	592.675.000	62.328.000	10,52%	246.461.000	41,58%	186.930.500	31,54%
6	Keterbukaan Informasi Publik	504.220.000	4.235.000	0,84%	11.042.000	2,19%	39.629.000	7,86%
20	Pengembangan Website Badan POM	467.500.000	4.235.000	0,91%	6.545.000	1,40%	34.285.000	7,33%
21	Penguatan Reformasi Birokrasi	36.720.000	0	0,00%	4.497.000	12,25%	5.344.000	14,55%
7	Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur TIK	8.441.091.000	7.342.053.726	86,98%	8.070.870.183	95,61%	7.767.324.402	92,02%
22	Tata Kelola Infrastruktur TIK	8.441.091.000	7.342.053.726	86,98%	8.070.870.183	95,61%	7.767.324.402	92,02%

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI S.D APRIL		REALISASI S.D MEI		REALISASI S.D JUNI	
			KEUANGAN		KEUANGAN		KEUANGAN	
			Rupiah (Rp)	Persentase (%)	Rupiah (Rp)	Persentase (%)	Rupiah (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(8)	(9)	(8)	(9)	(8)	(9)
8	<b>Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan POM</b>	<b>3.018.315.000</b>	<b>860.895.005</b>	<b>28,52%</b>	<b>1.563.005.210</b>	<b>51,78%</b>	<b>1.676.173.424</b>	<b>55,53%</b>
23	Koordinasi Pemenuhan Government-CSIRT	1.231.771.000	147.760.030	12,00%	685.477.695	55,65%	763.960.909	62,02%
24	Peningkatan Maturitas Penanganan Insiden	291.715.000	59.269.000	20,32%	59.269.000	20,32%	59.269.000	20,32%
25	Pemenuhan Peta Rencana SPBE	638.457.000	181.698.734	28,46%	239.817.274	37,56%	246.334.274	38,58%
26	Pelaksanaan Audit ISO SERIES	382.000.000	0	0,00%	106.274.000	27,82%	134.442.000	35,19%
27	Pembinaan JF Pranata Komputer	474.372.000	472.167.241	99,54%	472.167.241	99,54%	472.167.241	99,54%
9	<b>Layanan Informasi</b>	<b>141.100.000</b>	<b>2.975.400</b>	<b>2,11%</b>	<b>111.113.820</b>	<b>78,75%</b>	<b>5.187.600</b>	<b>3,68%</b>
28	Perkuatan Operasional Backoffice Contact Center	33.100.000	2.975.400	8,99%	3.153.000	9,53%	5.187.600	15,67%
29	Layanan Perpustakaan Badan POM	108.000.000	0	0,00%	107.960.820	99,96%	0	0,00%
10	<b>Layanan Data</b>	<b>723.706.000</b>	<b>204.184.580</b>	<b>28,21%</b>	<b>235.736.183</b>	<b>32,57%</b>	<b>256.966.003</b>	<b>35,51%</b>
30	Satu Data Obat dan Makanan	723.706.000	204.184.580	28,21%	235.736.183	32,57%	256.966.003	36%
11	<b>Pengelolaan Data</b>	<b>190.870.000</b>	<b>42.968.000</b>	<b>22,51%</b>	<b>44.354.000</b>	<b>23,24%</b>	<b>66.854.000</b>	<b>35,03%</b>
31	Tata Kelola Big Data BPOM	190.870.000	42.968.000	22,51%	44.354.000	23,24%	66.854.000	35,03%
12	<b>Penataan dan Penguatan Tata Laksana</b>	<b>3.196.096.000</b>	<b>1.920.366.192</b>	<b>60,08%</b>	<b>2.012.955.012</b>	<b>62,98%</b>	<b>2.125.703.102</b>	<b>66,51%</b>
32	Sosialisasi Sistem TIK	177.698.000	174.485.000	98,19%	174.485.000	98,19%	174.485.000	98,19%
33	Penyusunan Renstra TA 2025-2029 dan Pelaporan Kegiatan Pusdatin	312.247.000	83.554.000	26,76%	86.949.000	27,85%	94.633.000	30,31%
34	Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Pembangunan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital	353.706.000	163.395.047	46,20%	207.968.867	58,80%	210.088.867	59,40%
35	Peningkatan Kompetensi SDM TIK	234.302.000	23.398.000	9,99%	23.398.000	9,99%	26.452.000	11,29%
36	Perkuatan Implementasi SAKIP Pusdatin 2024	372.925.000	195.858.000	52,52%	210.011.000	56,31%	222.840.000	60%
37	Sosialisasi Layanan Jaringan Intra Pemerintah dalam rangka Implementasi SPBE BPOM	886.498.000	879.764.145	99,24%	881.564.145	99,44%	881.564.145	99%
38	Tata Kelola Kinerja Individu dan Unit Kerja Pusdatin	758.720.000	363.568.000	47,92%	392.235.000	51,70%	472.366.090	62,26%
39	Peningkatan Manajemen Perubahan Pusdatin	100.000.000	36.344.000	36,34%	36.344.000	36,34%	43.274.000	43,27%

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI S.D APRIL		REALISASI S.D MEI		REALISASI S.D JUNI	
			KEUANGAN		KEUANGAN		KEUANGAN	
			Rupiah (Rp)	Persentase (%)	Rupiah (Rp)	Persentase (%)	Rupiah (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(8)	(9)	(8)	(9)	(8)	(9)
13	<b>Monitoring dan Evaluasi Kinerja Layanan TIK</b>	<b>4.060.519.000</b>	<b>428.745.000</b>	<b>10,56%</b>	<b>827.564.189</b>	<b>20,38%</b>	<b>685.526.017</b>	<b>17%</b>
39	Monev Business Continuity Plan (BCP)	351.330.000	131.962.000	37,56%	145.862.000	41,52%	160.562.000	46%
40	Monev Pusat Keamanan Data dan Informasi	139.206.000	0	0,00%	45.590.000	32,75%	50.995.000	37%
41	Monev Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE)	165.003.000	53.137.000	32,20%	55.447.000	33,60%	60.991.000	37%
42	Monev Kebijakan TIK	411.245.000	124.172.000	30,19%	273.764.000	66,57%	155.932.000	38%
43	Monev Enterprise Architectur (EA) Badan POM	590.683.000	38.575.000	6,53%	224.778.189	38,05%	174.087.017	29%
44	Monev Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK	156.843.000	80.899.000	51,58%	82.123.000	52,36%	82.959.000	53%
	<b>BLOKIR AA</b>	<b>2.246.209.000</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>49.458.463.000</b>	<b>18.725.522.044</b>	<b>37,86%</b>	<b>31.182.606.309</b>	<b>63,05%</b>	<b>25.135.610.255</b>	<b>50,82%</b>

Berikut realisasi anggaran per indikator kinerja pada triwulan II tahun 2024 per tanggal 30 Juni 2024:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI
1.	Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	Indeks SPBE Badan POM	1.229.140.000	420.421.291
2.	Meningkatnya Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan TIK Badan POM	Indeks Kepuasan Layanan TIK	353.706.000	210.088.867
3.	Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	1.248.103.000	216.493.190
		Persentase Pemenuhan <i>Bussines Continuity Management</i>	351.330.000	160.562.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI
		Indeks CSIRT ( <i>Computer Security Incident Response Team</i> )	1.662.692.000	874.224.909
		Jumlah Data Berbagi Pakai	831.706.000	256.966.003
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	592.675.000	186.930.500
4.	Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan <i>Realtime</i>	14.544.041.000	4.507.323.033
5.	Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan <i>Roadmap</i> TIK	886.498.000	881.564.145
6.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal	Indeks RB Pusat Data dan Informasi	895.440.000	520.984.000
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	685.172.000	317.473.000
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	69.828.000	10.159.000
7.	Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi	708.674.000	498.619.241
8.	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	190.870.000	66.854.000
		Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	568.088.000	238.891.000
		Sertifikasi ISO 27001	382.000.000	134.442.000
9.	Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	12.219.273.000	6.712.220.584
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	1.116.807.000	1.105.880.000
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	235.120.000	48.189.000
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	8.441.091.000	7.767.324.402

Tabel 3. Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja

### Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada setiap sasaran strategis dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut:

- 1) 0 - 0,2 : 100% (Efisien)
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)

- 5) 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)
- 8) 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)
- 9) 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)
- 10) > 1,81 : 75% (Tidak Efisien)

NO	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN ANGGARAN	% CAPAIAN SASARAN STRATEGIS	TINGKAT EFISIENSI	KATEGORI
1.	Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	34,20	0	75%	Tidak Efisien
2.	Meningkatnya Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan TIK Badan POM	59,40	0	75%	Tidak Efisien
3.	Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal	36,17	106,07	75%	Tidak Efisien
4.	Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	30,99	111,90	75%	Tidak Efisien
5.	Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal	99,44	103,60	100%	Efisien
6.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal	51,42	0	75%	Tidak Efisien
7.	Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	70,36	0	75%	Tidak Efisien
8.	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif	26,80	100,54	75%	Tidak Efisien
9.	Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel	71,02	120	90%	Efisien

Pada triwulan II TA 2024, Pusdatin memiliki 9 (Sembilan) sasaran strategis dengan total capaian indikator 60,23% dan capaian anggaran 50,03%, dari data tersebut dapat diketahui hasil Tingkat Efisiensi Pusdatin sebesar 95% atau dengan kategori EFISIEN. Dari 9 (Sembilan) sasaran strategis yang Pusdatin miliki, hanya terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang efisien, hal ini disebabkan karena salah satu capaian indikator pada sasaran strategis tersebut sudah melebihi target triwulan II yang telah ditentukan. Sedangkan untuk 8 (delapan) sasaran strategis lainnya masih dalam proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah disepakati, sehingga kedepannya perlu dilakukan beberapa upaya seperti menghapuskan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pencapaian sasaran, dan memfokuskan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator pada sasaran strategis.

## BAB IV PENUTUP

Pada Tahun 2024 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) indikator kinerja kegiatan. Capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) indikator kinerja dengan kriteria **SANGAT BAIK** yaitu Persentase keluhan layanan TIK yang ditindaklanjuti tepat waktu.
- 2) 1 (satu) indikator kinerja dengan kriteria **BAIK** yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal.
- 3) 4 (empat) indikator kinerja dengan kriteria **CUKUP** yaitu:
  - a. Persentase pemenuhan *business continuity management*;
  - b. Persentase sistem informasi pengawasan obat dan makanan terintegrasi dan *realtime*;
  - c. Persentase pemenuhan standar sistem informasi, infrastruktur, data dan keamanan; dan
  - d. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa.
- 4) 3 (tiga) indikator kinerja dengan kriteria **KURANG** yaitu
  - a. Jumlah data berbagi pakai;
  - b. Persentase data dan informasi yang mutakhir; dan
  - c. Persentase pemenuhan infrastruktur TIK sesuai dengan *roadmap* TIK. dan
- 5) 10 (sepuluh) indikator kinerja yang **BELUM DAPAT DITENTUKAN** kriterianya yaitu:
  - a. Indeks SPBE Badan POM;
  - b. Indeks Kepuasan Layanan TIK;
  - c. Indeks CSIRT (*Computer Security Incident Response Time*);
  - d. Indeks RB Pusat Data dan Informasi;
  - e. Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi;
  - f. Nilai Pengelolaan Arsip;
  - g. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi;
  - h. Sertifikasi ISO 27001;
  - i. Nilai kinerja anggaran Pusat Data dan Informasi;
  - j. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
  - k. Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri.